



ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2023

(Rochmania Firda, Nanik Istiyani, Lilis Yuliaty, Agus Luthfi)

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI JAWA TENGAH

(Nova Tri Nurmalasari, Fivien Muslihatiningsih, Edy Santoso, Sjafruddin)

RELEVANSI EKSPEKTASI INFLASI DAN UTANG PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN MONETER DI ASEAN-5

(Naura Syafiya Ramadhani, M. Abd. Nasir, Inayah Swasti Ratih, Ra'iyatu Imadidin)

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH (SLA) DI KAMPUNG BLEKOK KABUPATEN SITUBONDO

(Vindi Diah Fatika Sari, Aisah Jumiaty, Fajar Wahyu Prianto, Dwi Perwitasari Wiryaningtyas)

ANALISIS PENGARUH PARIWISATA, KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ASEAN-5

(Shine Elverda)

Production by:



**UNIVERSITAS
JEMBER**

EDITORIAL TEAM

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.	Penanggung Jawab
2. Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E.	Editor in Chief
3. Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.	Managing Editor
4. Rachmania Nurul Fitri Amijaya, S.E., M.SEI.	Editor Board
5. M. Abd. Nasir, S.E., M.Sc.	Editor Board
6. Musa Al Kadzim, S.Ag., M.Ag.	Editor Board/Section editor
7. Inayah Swasti Ratih, M.S.E.I.	Layout Editor

REVIEWER

1. Dr. Arman, S.P.,M.Si	Reviewer
2. Dr. Farida, S.E.,M.M	Reviewer
3. Dr. Tegus Endaryanto, S.P.,M.Si	Reviewer
4. Asih Murwiati, S.E.,M.E	Reviewer
5. Ela Hasri Windari,S.Si.,M.Sc	Reviewer
6. Tajul Iflah, S.TP.,M.Si	Reviewer

DAFTAR ISI

ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2023	55-68
(Rochmania Firda, Nanik Istiyani, Lilis Yuliati, Agus Luthfi)	
PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI JAWA TENGAH	69-76
(Nova Tri Nurmalasari, Fivien Muslihatiningsih, Edy Santoso, Sjafruddin)	
RELEVANSI EKSPEKTASI INFLASI DAN UTANG PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN MONETER DI ASEAN-5	77-95
(Naura Syafiya Ramadhani, M. Abd. Nasir, Inayah Swasti Ratih, Ra'iyatu Imadidin)	
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH (SLA) DI KAMPUNG BLEKOK KABUPATEN SITUBONDO	96-105
(Vindi Diah Fatika Sari, Aisah Jumiati, Fajar Wahyu Prianto, Dwi Perwitasari Wiryaningtyas)	
ANALISIS PENGARUH PARIWISATA, KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ASEAN-5	106-115
(Shine Elverda)	



ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2023

Rochmania Firda*, Nanik Istiyani¹, Lilis Yulianti¹, Agus Luthfi¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember, Indonesia

* Corresponding Author: 210810101093@mail.unej.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the influence of UMK, PDRB and HDI on labor absorption in East Java Province in 2015-2023 with a research model of panel data regression analysis. In other words, panel data is data obtained from cross sections that are repeatedly observed on the same individual unit at different times. Then a description of the behavior of several objects will be obtained over several time periods and see how the influence of the independent variables is partially through the t test and simultaneously through the F test on the dependent variable. And, knowing how much percentage of the independent variables in this study affect the dependent variable. The estimation results show that UMK does not affect labor absorption in East Java Province, PDRB affects labor absorption in East Java Province and HDI does not affect labor absorption in East Java Province

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh UMK, PDRB dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2023 dengan model penelitian adalah analisis regresi data panel. diperoleh gambaran perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu dan melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F terhadap variabel dependen. Serta, mengetahui seberapa besar presentase variabel independen dalam penelitian ini memengaruhi variabel dependen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa UMK berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, PDRB tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dan IPM berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

Informasi Naskah

Submitted: 27 Mei 2025

Revision: 5 September 2025

Accepted: 1 Oktober 2025

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja.

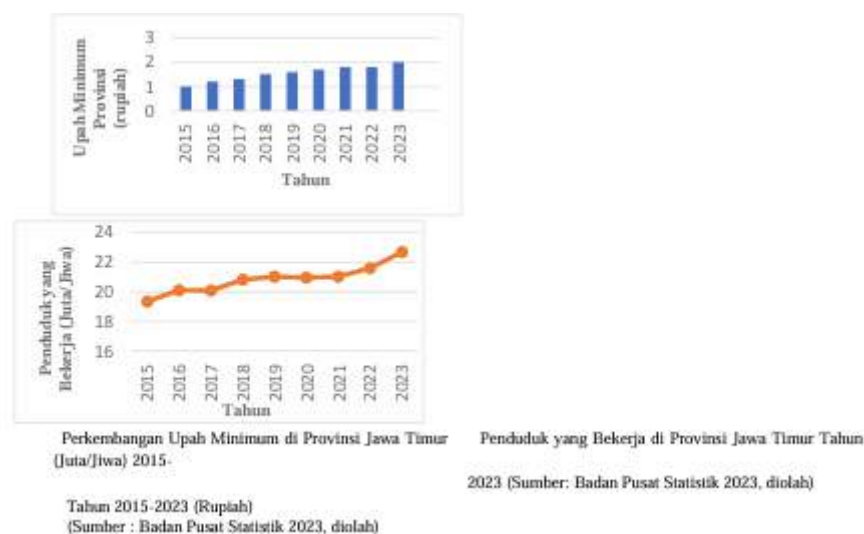
1. PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang bisa diterima guna mengerjakan tugasnya dan menggambarkan lapangan kerja yang tersedia kemudian akan diisi oleh para pencari kerja. Apabila tenaga kerja sudah menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada mereka maka akan mendapatkan upah atau imbalan. (Kurniawan & Aisyah, 2023). Teori klasik menurut Adam Smith yaitu kekayaan di dalam suatu negara akan bertambah sesuai dengan ketrampilan tenaga kerja yang digunakan. Sumber utama pendapatan adalah produksi dari hasil tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat penyerapan tenaga kerja penuh (full employment). (Azzahra et al., 2023) Hal ini sejalan dengan Emil et al (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh PDRB, UMK, IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. Dalam penelitiannya penyerapan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh PDRB, UMK dan IPM. Dimana PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari peran manusia dalam mengelolanya.

Manusia berperan sebagai tenaga kerja, pelaku pembangunan, dan konsumen dari hasil pembangunan tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi dinegara berkembang bisa diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang bisa diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha guna meningkatkan kesejahteraan bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Apabila perekonomian di daerah itu tinggi, maka tercipta pasar tenaga kerja yang tinggi juga. (Muslihatinningsih et al., 2020). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang mempunyai masalah ketenagakerjaan. Masalah kependudukan Indonesia yaitu jumlah penduduk yang besar dan taraf pertumbuhannya yang tinggi serta tingkat persebaran penduduk tidak merata. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang besar sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja yang terus meningkat tetapi kesempatan kerja yang terbatas. Apabila dikaitkan dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia mestinya menjadi potensi dan peluang besar dalam pembangunan nasional. Masalah ketenagakerjaan terus mengalami kegagalan penciptaan lapangan kerja. Angka pengangguran berkembang pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja (Tarman et al., 2022). Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah

sebab wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, Kabupaten/kota.

Kegiatan pembangunan direncanakan dan dilaksanakan harus mampu menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari pembangunan ialah untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok meningkatnya standar hidup (pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan). Faktor tenaga kerja bagian dari SDM pada masa pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional (Safri et al., 2018). Provinsi Jawa Timur salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, artinya sebagian besar aktivitas perekonomian terjadi di Provinsi Jawa Timur. Hal itu karena provinsi Jawa Timur memiliki kemajuan dari sisi nilai ekonomi berupa infrastruktur dan sumber daya lokal sehingga mendorong pembangunan ekonomi. (Muslihatinningsih et al., 2020). Luas wilayahnya adalah 47.963 km dengan penduduk terbanyak kedua se Indonesia setelah Jawa Barat dan memiliki 38 Kabupaten/Kota. Kondisi penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 mengalami peningkatan yang signifikan,



Gambar 1.1 Data Uph Minium dan Jumlah Penduduk yang Bekerja

Menurut teori Adam Smith UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena kenaikan tingkat upah akan manikkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Kenaikan harga barang menyebabkan pembeli berkurang, berkurangnya produksi ini akan mengakibatkan menurunnya permintaan tenaga kerja. Karena jika tingkat upah naik, pengusaha akan mengganti tenaga kerja dengan teknologi padat modal sehingga permintaan tenaga kerja menurun, hal ini akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka penyerapan tenaga kerja meningkat. Tetapi kondisi riil di Provinsi Jawa Timur menurut Data BPS menunjukkan keadaan UMK dari tahun 2015-2023

mengalami kenaikan tetapi penyerapan tenaga kerja menurut data BPS juga mengalami kenaikan dari tahun 2015-2023.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1.1. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan seberapa lapangan usaha dapat memperkerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah disuatu periode tertentu. Kenaikan permintaan konsumen akan barang yang diproduksi dapat mempengaruhi kenaikan terhadap permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan upah dan jumlah pekerja yang digunakan pengusaha guna dipekerjakan sehingga permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja *yang* dipekerjakan pengusaha pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa. Kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan tingkat upah. Hal ini akan menyebabkan tingkat upah menurun akibat bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat. Sebaliknya tingkat upah akan meningkat jika penawaran tenaga kerja menurun. Dengan demikian, kenaikan upah akan menaikkan tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Kenaikan harga barang menyebabkan pembeli berkurang, berkurangnya produksi ini akan mengakibatkan menurunnya permintaan tenaga kerja. Karena jika tingkat upah naik, pengusaha akan mengganti tenaga kerja dengan teknologi padat modal sehingga permintaan tenaga kerja menurun, hal ini akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka penyerapan tenaga kerja meningkat (Krismunita et al., 2023).

2.1.2. Hukum Okun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usahanya di suatu daerah atau regional (Lube et al., 2021). Hukum Okun (*Okun's law*) yang dikemukakan oleh Athur Melvin Okun (1962).



Gambar 2.2 Kurva Hukum Okun (Sumber: Mankiw, 2006)

Pada Gambar 2.2 menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, hal ini terbukti dilihat dari garis titik sebaran tiap pengamatan serta kurvanya berslope negatif. Hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan PDB meningkat maka akan menurunkan Tingkat pengangguran di negara berkembang dan sebaliknya jika GDP rill menurun akan meningkatkan pengangguran menyebutkan terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, Dimana jika terjadi kenaikan PDRB disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja didaerah tersebut juga akan mengalami kenaikan. Ha ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nanik Istiyani, 2022) dimana meningkatnya PDRB disuatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan berdampak terhadap kesempatan tenaga kerja yang meningkat. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja yakni jika terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu Perusahaan maka Perusahaan tersebut akan cenderung meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, jika PDRB mengalami penurunan maka jumlah tenaga kerja ikut mengalami penurunan.

2.1.3. Human Capital

Teori *human capital* berpendapat jika modal manusia faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini bisa dilihat dari Tingkat Pendidikan, Kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan Pembangunan manusia (Ratnasari et al., 2019). Teori human capital yang dikembangkan oleh Becker (1992) berpendapat bahwa meningkatkan produktivitas manusia. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, yang ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas kerja dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Silvia & Susilowati, 2023).

Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting karena kualitas sumber daya manusia akan memengaruhi Tingkat produktivitas kerja, sehingga tingginya sumber daya manusia yang bermutu aksesibilitas dalam penyerapan tenaga kerja tinggi. Pembangunan manusia ialah suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan

peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang Pembangunan (*United Nation Development Programme, UNDP*). Arti penting manusia dalam Pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek Pembangunan yang artinya Pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau Masyarakat. UNDP telah menerbitkan suatu indicator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan Pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

IPM suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat Berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur Kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur Pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagas, 2022) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja . Apabila IPM mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat

3. METODE

3.1. Data

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yaitu metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Jenis penelitian *explanatory* merupakan jenis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, pola hubungan, dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih (Ismail :48). Dalam hal ini guna mengetahui adanya pengaruh variabel UMK, PDRB dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, maka data yang diperoleh dengan menata dan menyalin data yang telah dikumpulkan oleh instansi yang telah tersusun dan siap diolah. Sumber data ini berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Data yang digunakan adalah periode tahun 2015-2023 berupa data runtut (*time series*).

3.2. Teknik Analisis

Model ini mengasumsikan bahwa dalam berbagai kurun waktu, karakteristik masing-masing individu adalah berbeda. Hanya saja, dalam REM perbedaan tersebut dicerminkan oleh error dari model. Panel persamaan model dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut (Savitri et al., 2021:97)

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1UMK_{it} + \beta_2PDRB_{it} + \beta_3IPM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Penyerapan Tenaga Kerja

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

β_0 = Konstanta

UMK = Upah Minimum Kabupaten/kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = 34 Kabupaten/kota

t = waktu (2015-2023)

e = Error Term (Faktor Kesalahan)

4. HASIL DAN DISKUSI

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mencari model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Model terbaik antara common effect model dan fixed effect model.

Hasil Uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Uji Chow

Statistic	d.f	Prob	Effect Test
1917.368932	(33.269)	0.0000	Cross-section F
1672.212813	33	0.0000	Cross-section Chi-square

Sumber: Data BPS diolah, 2023

Pada lampiran diatas bahwa hasil uji chow menunjukkan probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dan kurang dari 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*

2. Uji Hausman

Uji Hausman yang juga bertujuan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Hasil uji hausman pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.2 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.995775	3	0.1118

Sumber: Data BPS diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil estimasi Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.1118 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan begitu model terbaik adalah *Random effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Hasil Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan apakah model *common effect model* dan *fixed effect model* terpilih setelah *random effect model* yang merupakan model terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	34.34708	-2.023566	22.85617
	(0.0000)	(0.9785)	(0.0000)

Berdasarkan hasil estimasi dengan Uji Lagrange Multiplier didapat bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka model yang terpilih dalam Uji Lagrange Multiplier adalah *random effect model*. Berdasarkan hasil uji Chow, hausman dan uji LM maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah REM.

4. Estimasi Model Regresi Panel dengan *Random Effect*

Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel
(Sumber: Peneliti, diolah)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-918105.069071	153341.4	-5.987325	0.0000
Log UMK	62889.69	17248.16	3.646167	0.0003
Log PDRB	5039.279	8069.352	0.624496	0.5328
IPM	76.83919	20.35285	3.775354	0.0002

Berdasarkan tabel hasil diatas Random Effect model dapat dituliskan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$y = -918105.069071 + 62889.6928624 \text{ LOG(UMK)} + 5039.27863009 \text{ LOG(PDRB)} + 76.8391944462 \text{ IPM}$$

- Nilai koefisien variabel UMK sebesar 62889.6928624 rupiah, jika nilai variabel konstanta dan variabel UMK mengalami peningkatan 1%, maka variabel PTK akan mengalami peningkatan sebesar 62889.6928624 rupiah. begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel UMK mengalami penurunan 1% maka variabel PTK akan mengalami penurunan sebesar 62889.6928624 rupiah
- Nilai koefisien variabel PDRB sebesar 5039.27863009 rupiah, jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB mengalami peningkatan 1% maka variabel PTK akan mengalami peningkatan sebesar 5039.27863009 rupiah. begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB mengalami penurunan 1%, maka variabel PTK akan mengalami penurunan sebesar 5039.27863009 rupiah
- Nilai koefisien variabel IPM sebesar 76.8391944462 persen, jika nilai variabel lain konstan dan variabel IPM mengalami peningkatan 1% maka variabel PTK akan mengalami peningkatan sebesar 76.8391944462 persen. jika nilai variabel lain konstan dan variabel IPM mengalami penurunan 1%, maka variabel PTK akan mengalami penurunan sebesar 76.8391944462 persen

5. Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM) didapat adanya pengaruh yang signifikan antara UMK dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023 variabel UMK memiliki hubungan positif terhadap variabel penyerapan tenaga kerja. Upah mampu mendorong tenaga kerja untuk lebih produktif, dengan demikian kenaikan upah akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga naiknya daya beli akan berpengaruh pada meningkatnya produksi pada perusahaan yang mengakibatkan pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini

tidak sesuai dengan teori Adam Smith dimana ia menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang produksi. Kenaikan harga barang menyebabkan pembeli berkurang, berkurangnya produksi ini akan mengakibatkan menurunnya permintaan tenaga kerja. Karena jika tingkat upah naik, pengusaha akan mengganti tenaga kerja dengan teknologi padat modal sehingga permintaan tenaga kerja menurun, hal ini akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka penyerapan tenaga kerja meningkat

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Emil (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa variable UMK berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dilihat dari nilai Koefisien UMK sebesar 0,034396. Artinya setiap adanya peningkatan 1% UMK maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.034396 jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ilham (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa variable UMK berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila UMK mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

Kondisi UMK di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 menurut data Badan Pusat Statistik terus mengalami peningkatan dan kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 juga terus mengalami peningkatan artinya UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan Upah mampu mendorong tenaga kerja untuk lebih produktif, dengan demikian kenaikan upah akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga naiknya daya beli akan berpengaruh pada meningkatnya produksi pada perusahaan yang mengakibatkan pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

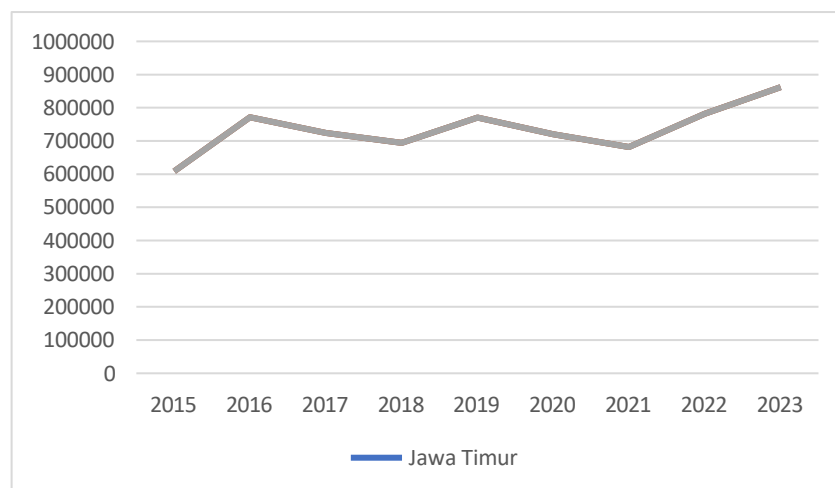
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) didapat bahwa variable PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2023, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2023. variabel PDRB memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Penelitian ini sejalan dengan Hukum Okun dimana ketika PDRB meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan permintaan

tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Dan sebaliknya apabila PDRB menurun maka penyerapan tenaga kerja juga akan menurun.

Penelitian ini sejalan dengan teori hukum okun dimana meningkatnya PDRB disuatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan berdampak terhadap kesempatan tenaga kerja yang meningkat. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja yakni jika terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu Perusahaan maka Perusahaan tersebut akan cenderung meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Felber (2021) dalam jurnal yang berjudul analisis pengaruh upah minimum dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. Dengan hasil variabel PDRB menunjukkan koefisien sebesar 0.111 dengan nilai probabilitas sebesar 0,699 atau lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja, setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 111 jiwa di Kota Bitung Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puti (2023) dimana hasil PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4.5 Teknologi industri di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016
(unit). (Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah)

Kondisi PDRB di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 menurut data Badan Pusat Statistik terus mengalami peningkatan dan kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 juga mengalami peningkatan artinya PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur hal ini

dikarenakan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja diberbagai sektor dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan teknologi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih besardengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja. Akibatnya meskipun PDRB atau output mengalami peningkatan hal ini tidak serta merta menciptakan peluang kerja baru terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan kerja. Oleh karena itu peningkatan produktivitas akibat otomatis dapat menjadi salah satu alasan mengapa penyerapan tenaga kerja menjadi minim, meskipun indikator ekonomi seperti PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif.

- **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur.**

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM) didapat bahwa variable IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2023. variabel IPM memiliki hubungan positif terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup penduduk, secara signifikan IPM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan terampil. Ketika IPM disuatu wilayah meningkat, hal ini menandakan bahwa penduduknya memiliki akses yang lebih baik terhadap kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas mereka untuk memasuki Dunia kerja, baik disektor formal maupun informal (Prayoga, 2023)

Penelitian ini sesuai dengan teori human capital yang dikembangkan oleh Becker (1992) berpendapat bahwa meningkatkan produktivitas manusia. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, yang ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas kerja dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emil (2020) dalam hasil penelitiannya ditemukan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dimana Berdasarkan uji t nilai probabilitas variable IPM adalah $0,0010 < 0,05$ hal ini berarti IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Kemudian nilai koefisien variable IPM sebesar 2.243.871%. artinya jika terjadi 1% peningkatan IPM maka akan meningkatkan

penyerapan tenaga kerja sebesar 2.243.871 jiwa di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2023) dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dimana apabila IPM meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan.

Kondisi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2023 menurut data Badan Pusat Statistik bahwa Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan dari 2015-2023 dan kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa timur dari tahun 2015-2023 juga mengalami peningkatan hal ini berarti apabila indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga mampu dan lebih siap untuk memasuki dunia kerja.

5. SIMPULAN

Upah Minimum Kabupaten (UMK) memberikan pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023.

REFRENSI

- Agus, T. B. (2016). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews). Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angkat, F., Nainggolan, N. P., Tanjung, A. A., & Lubis, P. K. D. (2024). Pengaruh Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Tahun 2008-2022. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 714–721.
- Azzahra, F., Mukhtar, S., & Iranto, D. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Upah Minimum Provinsi , dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2016-2022. *Simonika Journal*, 2(2), 185–196.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8, cetakan ke-8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro..

- Gujarati, D.N. (2012). *Dasar- Dasar Ekonometrika (Edisi 5)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Iksan, S. A. N., Arifin, Z., & Suliswanto, M. S. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 42–55.
- Ismail, I., Asrul, H. A., Madi. (2018). Metodologi Penelitian. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Isnaini, S. J., & Nugroho, R. Y. Y. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 176–187.
- Krismunita, Y., Yusuf, E., & Gunanto, A. (2023). Pada Industri Kecil dan Mikro Di Indonesia. *12*(4), 31–37.
- Kurniawan, A., & Aisyah, S. (2023). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 198–207.
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- Muslihatinningsih, F., Walid, M., Wayan, I., Jurusan, S., Ekonomi, I., & Pembangunan, S. (2020). Muslihatinningsih et al., Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur (Labor Absorption in East Java Province). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, VII(1), 1– 6.
- Milasi, S., & Grimshaw, D. (2019). World Employment and Social Outlook: Trends 2019. international Labour Office: Geneva.
- Prayoga., B. (2023). Pengaruh pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Medan. *Journal Economic And Strategy (JES)*, 4(1), 42-51.
- Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 7(2), 174–188.
- Ratnasari, G. T., Wibisono, S., & Hanim, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuki. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, 3(2), 2548–8945.
- Rizma, Z. O., & Muchtolifah. (2023). Pengaruh Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Nganjuk. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6356–6362.
- Safri, M., Ziyadaturrofiqoh, & Zulfanetti. (2018). Pengaruh PDRB , Upah Minimum

- Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *E- Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(1), 13–22.
- Savitri, C., Pramudita, S. P., Irmawartini. (2021). Statistik Multivariat Dalam Riset. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sihabudin., Wibowo, D., Mulyono, S. (2021). Ekonometrika Dasar Teori Dan Praktik Berbasis SPSS. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Silvia, A., & Susilowati, D. (2023). Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(04), 531–539.
- Tarman, M., Ruski, R., Purnomo, I. A., Wahyuni, W., Zahroh, A., Besri, H., & Wafa, M. (2022). Pengaruh Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 110–115.
- Try Wahyu Utami, Susanto, P. C., Sawitri, N. N., Lesmini, L., Setyowati, T. M., Belani, S., Perwitasari, E. P., Marlita, D., Mulyanto, Setyawati, A., Roza, N., Tahir, A. M. S., Indryati, Hasibuan, L., Jumawan, & Widyastuti, T. (2023). Ekonomi Sumber Daya Manusia Konsep dan Teori. Makassar: CV Ayrada Mandiri.
- Usmadi, U. (2020). Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas Dan Uji Normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1), 50–62.



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI JAWA TENGAH

Nova Tri Nurmalasari^{1*}, Fivien Muslihatiningsih¹, Edy Santoso¹, Sjafruddin¹

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia

* Corresponding Author: novatn19@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of life expectancy, average length of schooling, and real expenditure per capita on the level of female labor force participation in Central Java Province. The data used are secondary data from 2019 to 2019. The data analysis method used in this study is the panel data regression method with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of this study indicate that life expectancy has a positive and significant effect on the level of female labor force participation in Central Java. The variables of average length of schooling and real expenditure per capita have a negative and insignificant effect on the level of female labor force participation in Central Java.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data sekunder selama tahun 2019 hingga 2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah. Variabel rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah.

Informasi Naskah

Submitted: 20 Juni 2025

Revision: 10 September 2025

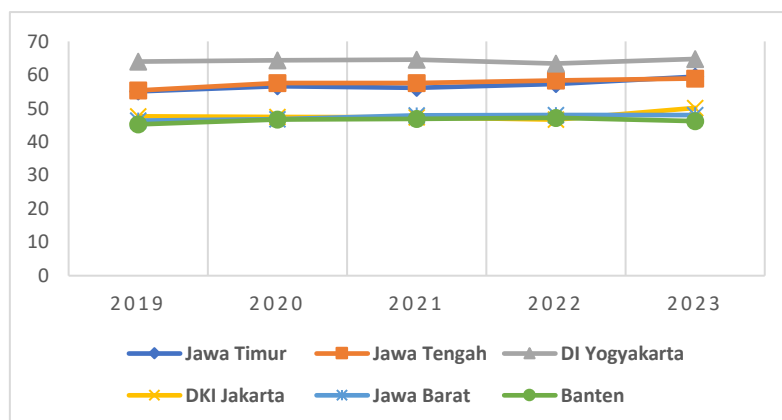
Accepted: 5 Oktober 2025

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil per Kapita

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk membentuk perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam prosesnya, kontribusi tenaga kerja memiliki dampak besar terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi di sebuah negara. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan. Dalam konteks pembangunan nasional partisipasi angkatan kerja perempuan adalah hal yang harus diperhitungkan, sebab keberadaan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan (Anwar *et al.*, 2018).

Kondisi TPAK perempuan di pulau Jawa pada tahun 2019-2023 sudah mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Pada periode tersebut, TPAK perempuan tertinggi di Pulau Jawa diduduki oleh provinsi DI Yogyakarta, yang selanjutnya disusul oleh provinsi Jawa Tengah. Sedangkan TPAK perempuan dengan tingkat terendah di Pulau Jawa diduduki oleh provinsi Banten. Di Pulau Jawa khususnya, Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi yang menunjukkan tren baik karena memiliki jumlah TPAK perempuan yang selalu meningkat disetiap tahunnya pada lima tahun terakhir. Hal tersebut mencerminkan bahwa perempuan di provinsi Jawa Tengah sudah banyak yang terjun dalam pasar tenaga kerja. Jika dilihat dari segi ekonomi, tentunya bagus untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya juga ikut meningkat.



Gambar 1. TPAK Perempuan di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS, 2024)

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia (Budihardjo, 2020). Pengukuran IPM dibagi menjadi tiga

indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran riil perkapita.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan TPAK perempuan di Jawa Tengah. Guna menjadi acuan dalam membuat kebijakan agar mencapai tujuan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara maksimal sehingga tidak terdapat ketimpangan terlalu jauh dengan TPAK laki-laki, mengurangi adanya kesenjangan gender, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Human Capital dikembangkan oleh seorang ekonom peraih Nobel Ekonomi berkebangsaan Amerika pada tahun 1960-an yang bernama Gary Becker. Teori human capital menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja. Teori ini berpandangan bahwa modal manusia yang dimiliki oleh seorang pekerja, seperti keterampilan dan pengetahuan, merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964:15). Dalam konteks partisipasi angkatan kerja perempuan, investasi dalam human capital memiliki peran yang sangat penting karena mempengaruhi keputusan perempuan untuk masuk ke pasar kerja dan mempertahankan karir mereka. Teori human capital menyediakan kerangka untuk memahami hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan partisipasi angkatan kerja, terutama perempuan. Peningkatan dalam komponen IPM yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan human capital individu. Hal tersebut, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas yang akan mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam angkatan kerja khususnya perempuan.

Selain itu, penelitian ini didukung Teori *Added Worker Effect* (AWE) yang dikembangkan oleh Woytinsky dan Humphrey pada tahun 1940 merupakan salah satu teori penting dalam ekonomi ketenagakerjaan. Teori ini dikenalkan pasca terjadinya depresi besar pada perekonomian Amerika Serikat, dan setelah itu kajian tentang AWE banyak digunakan diberbagai wilayah baik negara maju maupun negara berkembang yang sedang mengalami resesi ekonomi. *Added Worker Effect* (AWE) merupakan situasi dimana satu orang anggota keluarga kehilangan pekerjaan, terutama terjadi pada kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama, sehingga mendorong anggota keluarga yang lain (terutama istri) untuk mencari pekerjaan dalam upaya menutupi kehilangan penghasilan agar dapat mencukupi tingkat pengeluaran rumah tangga (Woytinsky, 1940). Hal

tersebut mengakibatkan naiknya partisipasi angkatan kerja perempuan karena istri harus bekerja untuk menggantikan suami yang kehilangan pekerjaan tersebut.

3. METODE

3.1. Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. *Explanatory research* juga dikenal sebagai penelitian penjelasan atau penelitian kasual, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti (Fitriah AR, 2020). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan data Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil per Kapita dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.2. Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter data panel adalah data yang terdiri dari dua bagian yaitu data kurun waktu (time-series) dan data deret lintang (cross-section) (Budihardjo, 2021). Pada penelitian ini, data time series yang digunakan adalah data tahunan selama lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dan data cross section terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian. Adapun model yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TPAKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 AHH_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 PP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TPAKP : Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

AHH_{it} : Angka harapan hidup provinsi i pada tahun t

RLS_{it} : Rata-rata lama sekolah provinsi i pada tahun t

PP_{it} : Pengeluaran riil per kapita provinsi i pada tahun t

i : *Cross Section* (Provinsi)

t : *Time Series* (Tahun)

β_0 : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

ε : Komponen error

4. HASIL DAN DISKUSI

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-483.2296	146.4362	-3.299933	0.0012
AHH	7.149951	2.057201	3.475572	0.0007
RLS	-0.711800	1.534462	-0.463876	0.6435
PP	-0.000294	0.001198	-0.245414	0.8065

Sumber: output evIEWS 10

Berdasarkan tabel 1, hasil analisis data menggunakan *fixed model effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{TPAKP} = -483,2296 + 7,149951\text{AHH} - 0,711800\text{RLS} - 0,000294\text{PP}$$

Interpretasi dari hasil estimasi regresi data panel dengan *fixed model effect* tersebut yakni:

1. Nilai konstanta pada penelitian ini sebesar -483,2296 menjelaskan bahwa apabila angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita bernilai tetap atau konstan, maka TPAKP akan menurun sebesar 483,2296%.
2. Nilai koefisien variabel angka harapan hidup sebesar 7,149951 menunjukkan apabila nilai angka harapan hidup meningkat 1 tahun maka TPAKP naik sebesar 7,149951% dengan asumsi rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita dianggap konstan.
3. Nilai koefisien variabel rata-rata lama sekolah sebesar -0,711800 menjelaskan jika rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan 1 tahun maka TPAKP akan turun sebesar 0,711800% dengan asumsi angka harapan hidup dan pengeluaran riil perkapita dianggap konstan.
4. Nilai koefisien variabel pengeluaran riil perkapita sebesar -0,000294 menunjukkan jika nilai pengeluaran riil perkapita meningkat 1 ribu rupiah maka nilai TPAKP menurun sebesar 0,000294% dengan asumsi angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah dianggap konstan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori *human capital* yang menyatakan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja. Penelitian ini didukung oleh penelitian Adiansyah (2021) yang menemukan bahwa meningkatnya angka harapan hidup perempuan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten/kota

di Jawa Tengah pada periode 2019-2023 memiliki angka harapan hidup yang tinggi, sehingga rata-rata durasi partisipasi dalam angkatan kerja juga lebih panjang, dengan proporsi penduduk usia 55-64 tahun yang masih aktif bekerja lebih tinggi dibandingkan di wilayah dengan angka harapan hidup yang lebih rendah.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *human capital* yang dikembangkan oleh Gery Becker yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas individu dalam pasar tenaga kerja. Namun, penelitian ini didukung oleh Surbakti & Hasan (2023) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2019. Angkatan kerja perempuan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023 banyak bekerja pada industri pengolahan. Sebagian besar pekerjaan industri ini tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi, melainkan lebih mengandalkan keterampilan teknis yang dapat dipelajari melalui pelatihan singkat atau *on-the-job training*. Hal tersebut membuat industri pengolahan ini memiliki kecenderungan untuk menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang relatif rendah hingga menengah. Akibatnya, individu yang telah mengikuti pelatihan tetapi tidak mengenyam pendidikan formal akan sama produktivitasnya dengan mereka yang telah mengenyam pendidikan formal (Pamungkas, 2022).

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *Added Worker Effect* (AWE) yang dikembangkan oleh Woytinsky dan Humphrey. Namun, didukung oleh penelitian Ariansyah & Satria (2024) menyatakan pengeluaran per kapita wanita tidak berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita. Ketika pengeluaran per kapita perempuan sudah mencukupi kebutuhan dasar dan konsumtif, perempuan tidak merasakan dorongan ekonomi yang kuat untuk bekerja. Dalam banyak kasus, jika anggota keluarga lain (seperti suami atau orang tua) sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga, perempuan merasa tidak perlu menambah pendapatan keluarga melalui pekerjaan di luar rumah (Ariansyah & Satria, 2024). Keadaan tersebut sesuai dengan faktor sosial budaya Jawa Tengah, perempuan memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja setelah menikah atau memiliki anak.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Angka harapan hidup (AHH) perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) Jawa Tengah. Pemerintah diharapkan dapat membuat

kebijakan terkait peningkatan angka harapan hidup perempuan dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, selain itu perlu untuk memperhatikan angka kelahiran guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) Jawa Tengah. Dalam bidang pendidikan yang harus diupayakan adalah mendorong masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan minimal SMA atau SMK, dan memberikan bekal keterampilan agar setelah tamat sekolah siap untuk terjun ke pasar tenaga kerja.

Pengeluaran riil per kapita perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) Jawa Tengah. Adanya regulasi yang menjamin cuti keluarga, pengaturan kerja yang fleksibel, dan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis kehamilan atau pengasuhan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah terhadap perempuan dengan tanggung jawab keluarga, memungkinkan mereka untuk tetap di angkatan kerja.

REREFENSI

- Adiansyah, N. 2021. Pengaruh PDB, Angka Harapan Hidup Perempuan, Dan Tingkat Fertilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Brunei Darussalam Tahun 1990–2018. *Skripsi*. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anwar, Miftahtul Khair, Muh. Yani Balaka, dan La Ode Suriyadi. 2018. “Determinan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*. 3(2): 1-12.
- Ariansyah, F., & Satria, D. 2024. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*. 1(4).
- Budiardjo, A., Arianti, F., & Mas’ud, F. 2021. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Economics*. 9(2): 1-9.
- Fitriah AR, Y. 2020. Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia. *Skripsi*. Jember: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Pamungkas, G. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2018-

2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. 22(2): 1-12.
- Surbakti, E. N. C., & Hasan, Y. S. 2023. Pengaruh Pendidikan dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DI Provinsi Sumatera Utara. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. 16(1): 27-32.
- Woytinsky, W. S. 1940. Additional Workers and the Volume of Unemployment in the Depression (Vol. 1). *Committee on social security, Social Science research council*.



RELEVANSI EKSPEKTASI INFLASI DAN UTANG PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKAN MONETER DI ASEAN-5

**Naura Syafiya Ramadhani^{1*}, M. Abd. Nasir¹, Inayah Swasti Ratih¹,
Ra'iyatu Imadidin¹**

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia

*syafiyanau@gmail.com

Abstract

Monetary policy plays an important role in maintaining economic stability in ASEAN-5. Inflation expectations, government debt, and GDP growth are the main factors that influence the direction of monetary policy. Based on the theory of rational expectations, the inflation expectations that are formed affect the effectiveness of monetary policy. This study aims to analyze the development and influence of these three variables on monetary policy in ASEAN-5 using the Panel Least Square (PLS) method. The results show that inflation expectations and GDP have a significant positive impact on monetary policy. Increasing inflation encourages policy tightening, while GDP growth provides room for stabilization. However, a slowdown in GDP can encourage policy easing to maintain economic stability.

Abstrak

Kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di ASEAN-5. Ekspektasi inflasi, utang pemerintah, dan pertumbuhan GDP menjadi faktor utama yang memengaruhi arah kebijakan moneter. Berdasarkan teori ekspektasi rasional, ekspektasi inflasi yang terbentuk memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kebijakan moneter di ASEAN-5 menggunakan metode Panel Least Square (PLS). Hasilnya menunjukkan bahwa

Informasi Naskah

Submitted: 25 Juni 2025

Revision: 6 September 2025

Accepted: 3 Oktober 2025

Kata Kunci: Ekspektasi Inflasi, Utang Pemerintah, GDP, Kebijakan Moneter, ASEAN-5

ekspektasi inflasi dan GDP berdampak positif signifikan terhadap kebijakan moneter. Peningkatan inflasi mendorong pengetatan kebijakan, sementara pertumbuhan GDP memberi ruang untuk stabilisasi. Namun, perlambatan GDP dapat mendorong pelonggaran kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter berperan penting dalam mengatur perekonomian makro pada sistem ekonomi terbuka, dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan melalui pengaruhnya terhadap berbagai variabel ekonomi (Srithilat & G. Sun, 2017). Pengaruh kebijakan moneter terhadap pembangunan ekonomi dan perubahan aktivitas ekonomi agregat sangat bergantung pada perumusan kebijakan tersebut serta independensi bank sentral dalam menentukan instrumen moneter yang tepat untuk mencapai sasaran makroekonomi (Alvinasab, 2016). Suku bunga merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk mengatur stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap permintaan agregat. Penyesuaian suku bunga dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi, serta arus modal dan nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan output (Ghazali dan Ismail, 2019). Namun, kebijakan moneter tidak dapat dijalankan secara terpisah dari dinamika makroekonomi yang lebih luas, terutama terkait dengan utang pemerintah dan ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang tinggi dapat melemahkan efektivitas transmisi kebijakan moneter karena pelaku ekonomi mulai meragukan komitmen bank sentral terhadap stabilitas harga (Wulandari, 2022), sedangkan peningkatan rasio utang pemerintah dapat membatasi ruang gerak bank sentral dalam menaikkan suku bunga karena berpotensi meningkatkan beban bunga utang dan menimbulkan konflik antara kebijakan fiskal dan moneter (Rahman & Aziz, 2021). Oleh sebab itu, dalam konteks kebijakan suku bunga, penting untuk mempertimbangkan kondisi fiskal dan psikologi pasar terhadap prospek inflasi. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana perkembangan ekspektasi inflasi, utang pemerintah, GDP dan kebijakan moneter di ASEAN-5? Kedua, bagaimana hubungan ekspektasi inflasi, utang pemerintah dan GDP terhadap kebijakan moneter di ASEAN-5? Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan ekspektasi inflasi, utang pemerintah dan GDP di ASEAN-5 dan untuk menganalisis hubungan antara ekspektasi inflasi dengan kebijakan moneter, utang pemerintah dengan kebijakan

moneter, dan GDP dengan kebijakan moneter di ASEAN-5.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Fisher Effect* dan Ekspektasi Inflasi

Konsep keterkaitan antara inflasi dan suku bunga dijelaskan dalam Fisher Effect, yang dikembangkan oleh Fisher (1930). Fisher menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat inflasi yang diharapkan dan suku bunga nominal. Hipotesis Fisher menyatakan bahwa perubahan dalam ekspektasi inflasi akan tercermin secara proporsional dalam perubahan suku bunga nominal, sementara suku bunga riil tetap konstan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa bank sentral, dalam menetapkan suku bunga nominal, harus mempertimbangkan proyeksi inflasi masa depan. Fisher menambahkan bahwa karena adanya money illusion, pelaku ekonomi tidak selalu membedakan antara variabel nominal dan riil, terutama dalam jangka pendek. Oleh karena itu, suku bunga tidak selalu secara langsung mencerminkan ekspektasi inflasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi lebih kuat dan stabil (Fisher, 1930; Granville & Mallick, 2004). Fisher (1930) menyatakan bahwa pergerakan suku bunga nominal dipengaruhi oleh inflasi yang diharapkan. Dalam kerangka ini, suku bunga nominal mencerminkan penjumlahan antara suku bunga riil dan ekspektasi inflasi. Secara matematis, hubungan tersebut dirumuskan sebagai:

$$i = r + \pi^e \dots \dots \dots (1)$$

di mana i adalah suku bunga nominal, r adalah suku bunga riil, dan π^e adalah ekspektasi inflasi. Dengan mereformulasikan persamaan tersebut, maka ekspektasi inflasi dapat dihitung dengan mengurangkan suku bunga riil dari suku bunga nominal:

$$\pi^e = i - r \dots \dots \dots (2)$$

Teori Ekspektasi Inflasi dalam Perspektif *New Keynesian*

Dalam pendekatan ekonomi New Keynesian, ekspektasi inflasi memegang peranan penting dalam menentukan dinamika harga dan output dalam jangka pendek. Model New Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi secara forward-looking, artinya mereka memperkirakan inflasi masa depan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini (Gali, 2008). Ekspektasi inflasi menjadi krusial karena memengaruhi keputusan rumah tangga dan perusahaan, termasuk dalam penetapan harga dan upah (Clarida, Galí, & Gertler, 1999). Dalam model Phillips Curve versi New Keynesian, inflasi saat ini merupakan fungsi dari ekspektasi inflasi masa depan dan

output gap. Ini dikenal sebagai New Keynesian Phillips Curve (NKPC).

Teori Dominasi Fiskal

Dalam kerangka ini, dominasi fiskal terjadi ketika otoritas fiskal secara aktif menetapkan kebijakan belanja dan perpajakan tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal jangka panjang, seperti keberlanjutan utang publik (Leeper, 1991). Sebaliknya, otoritas moneter bersikap pasif dan menyesuaikan kebijakan moneternya, termasuk pengaturan suku bunga, untuk mengakomodasi kebutuhan fiskal, seperti pembiayaan defisit (Leeper, 1991; Woodford, 2001). Dalam situasi seperti ini, bank sentral kehilangan independensinya karena suku bunga tidak lagi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, melainkan untuk mendukung kebijakan fiskal, terutama dalam menjaga nilai riil utang pemerintah (Cochrane, 1998). Hal ini menyebabkan efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi menjadi terbatas, karena ekspektasi inflasi tidak dapat diredam secara optimal selama terdapat ketidakpastian terhadap konsistensi kebijakan fiskal (Bianchi & Melosi, 2017). Stabilitas harga lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan memastikan keberlanjutan pengelolaan utang (Leeper, 2016).

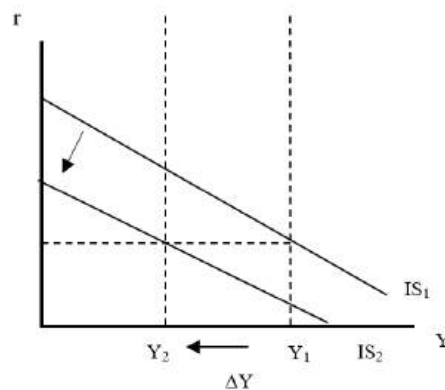
Teori Utang Pemerintah

Hyman (2010) mengatakan jika otoritas pemerintah negara bagian dan lokal harus memperhatikan upaya minimalisasi beban bunga atas hutang dan dengan risiko gagal bayar. Argumennya adalah bahwa ketidakmampuan untuk mengelola utang dengan bijak dapat mengakibatkan tekanan fiskal yang serius, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas fiskal jangka panjang. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penerbitan obligasi dan strategi alokasi sumber daya, untuk memastikan bahwa pendanaan melalui utang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biayanya. Pemerintah pemerintah harus mengevaluasi implikasi jangka panjang dari kebijakan utang terhadap generasi mendatang, baik dalam hal dampak ekonomi maupun distribusi keadilan fiskal.

Kebijakan Moneter

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan memengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro (Warjiyo,

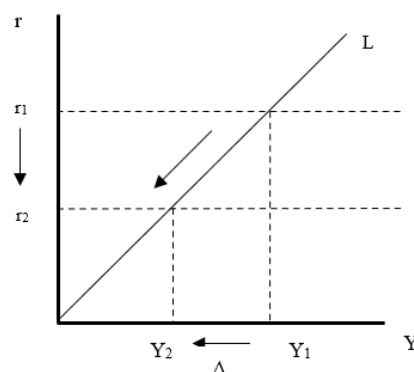
2003). Mankiw (2009) menjelaskan bahwa dalam model IS-LM, keseimbangan ekonomi jangka pendek ditentukan oleh interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan output, yang mencerminkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan hubungan positif antara suku bunga dan output untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang. Mishkin (2015) menegaskan bahwa pergeseran kurva IS maupun LM dapat menggambarkan respons ekonomi terhadap perubahan dalam pengeluaran pemerintah, perpajakan, maupun penawaran uang.



Gambar 1. Kurva IS

Sumber: Mankiw (2016)

Implikasi dari pergeseran kurva IS ini adalah bahwa kebijakan atau kejadian yang memengaruhi permintaan agregat dapat menyebabkan perubahan keseimbangan makroekonomi, terutama dalam hal output dan tingkat bunga. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan utang pemerintah sebagai akibat dari kebijakan fiskal ekspansif dapat menjadi salah satu penyebab pergeseran kurva IS ke kanan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kebijakan moneter dan kredibilitas bank sentral di negara-negara ASEAN.



Gambar 2. Kurva LM

Sumber: Mankiw (2016)

Hubungan positif antara pendapatan dan tingkat bunga ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar permintaan uang untuk transaksi, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan suku bunga. Sebaliknya, saat pendapatan turun, kebutuhan uang juga menurun sehingga suku bunga ikut menyesuaikan turun. Kurva LM ini sangat penting untuk menganalisis respons kebijakan moneter, karena perubahan dalam penawaran uang atau preferensi masyarakat terhadap uang dapat memengaruhi posisi kurva LM dan kondisi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.

3. METODE

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa data panel dengan periode 2005-2023, dan data cross section dari 5 negara ASEAN terpilih yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Data pada penelitian ini bersumber dari situs resmi data statistik dari World Bank, IMF, Bank Sentral masing-masing ASEAN-5. Rentang waktu tersebut ditentukan berdasarkan adanya fenomena krisis global 2008 dan krisis pandemi covid 2019.

Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan ada 2 yaitu analisis deskriptif statistik dan *Panel Least Square* (PLS). Analisis deskriptif merupakan suatu prosedur penyelesaian masalah dengan cara menggambarkan keadaan objek kajian dari fakta penelitian teoritis dan empiris (Nasir et al, 2013) sedangkan analisis regresi data panel digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel.

Model Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, Marques (2023) menganalisis apakah utang pemerintah memengaruhi kebijakan moneter melalui ekspektasi inflasi, sebagai berikut:

$$\pi(H)_{i,t+h}^e = \alpha_i^h + \nu_t^h + \sum_{s=0}^S \beta_s^h u_{i,t-s}^d + \sum_{j=1}^J \gamma_j^h \pi(H)_{i,t-j}^e + \mathbf{x}_{it}' \Gamma + \varepsilon_{i,t+h} \quad (1.1)$$

Dimana Variabel $\pi(H)_{i,t+h}^e$ merepresentasikan ekspektasi inflasi untuk horizon H pada negara i dan periode $t+h$, sedangkan $u_{i,t-s}^d$ merupakan kejutan terhadap rasio utang pemerintah terhadap PDB, $\mathbf{x}_{it}' \Gamma$ adalah variabel kontrol, α_i^h dan ν_t^h adalah efek tetap negara dan waktu dengan koefisien β_0^h sebagai respon ekspektasi inflasi terhadap spesifikasi kejutan utang diestimasi menggunakan estimasi dalam untuk setiap periode

proyeksi, dengan standar error yang berasal dari estimasi heteroskedastisitas dan autokorelasi konsisten milik Driscoll dan Kraay (1998).

Interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam memengaruhi dinamika utang dan inflasi dapat dilihat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana kebijakan moneter merespons inflasi melalui aturan suku bunga, serta bagaimana kebijakan fiskal merespons beban utang melalui penyesuaian pajak. Respons-respons kebijakan ini tercermin dalam model melalui dua aturan yang dibangun oleh Leeper (1991) dalam Mao *et al* (2023) sebagai berikut:

$$R_t = \max \{1, R \cdot (\frac{\pi_t}{\pi})^{as}\} \quad (1.2)$$

$$T_{t+1} = T_t + Y_t^s (b_{t+1} - b) \quad (1.3)$$

Dimana pada R_t dan T_{t+1} masing-masing mewakili aturan suku bunga (Rezim M vs F) dan aturan pajak (respon terhadap utang). $s \in \{F, M\}$, $\pi_t = \frac{\pi_t}{\pi}$ adalah utang riil pemerintah, π dan R adalah tingkat utang riil dan suku bunga nominal dalam kondisi stabil, $a^M > 1 > a^F$ dan $y^M > y^F \geq 0$. Pengaturan kalibrasi $a^F = 0$ berarti suku bunga acuan tidak bereaksi terhadap inflasi, dan tingkat harga harus disesuaikan untuk menentukan nilai utang riil pada t , mengingat nilai fiskal lain dalam kendala anggaran pemerintah.

Rezim F mirip dengan rezim M (Galí, 2020; Mao et al., 2023) karena keduanya menerapkan kebijakan moneter pasif, di mana otoritas moneter tidak secara aktif mengendalikan inflasi. Perbedaannya terletak pada penentuan suku bunga kebijakan. Dalam rezim F, suku bunga ditentukan oleh aturan kebijakan (lihat persamaan 2.11), sedangkan dalam rezim M, suku bunga nominal dan saldo uang riil ditentukan bersama oleh fungsi permintaan uang dan anggaran pemerintah terpadu. Rezim M juga menekankan peran pendapatan seigniorage dalam pembiayaan fiskal. Dalam model ini, kami mengasumsikan bahwa probabilitas transisi ke rezim M meningkat seiring inflasi, seperti dalam Mao et al. (2023). Kenaikan suku bunga The Fed pada Maret 2022 menunjukkan bahwa inflasi tinggi menjadi faktor utama dalam pergeseran menuju kebijakan moneter aktif (Dewan Gubernur, 2022). Secara khusus, probabilitas peralihan dari rezim F ke M ($P_{F,t}$)...

$$p_{F,t} = \frac{1 - \exp[l_1 + l_2(\pi_t - 1 - \pi)]}{1 + \exp[l_1 + l_2(\pi_t - 1 - \pi)]} \quad (3.4)$$

Penelitian ini menggunakan suku bunga sebagai variabel dependen karena merupakan alat utama kebijakan moneter yang disesuaikan oleh bank sentral untuk merespons kondisi ekonomi. Ekspektasi inflasi dimasukkan karena bank sentral cenderung menaikkan suku bunga saat inflasi yang diharapkan meningkat, guna menjaga stabilitas harga (Clarida et al., 1999). Utang pemerintah memengaruhi kebijakan

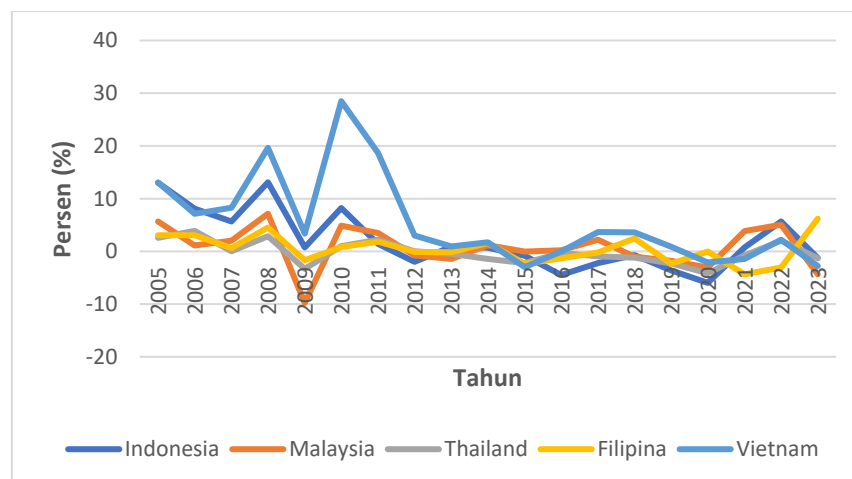
moneter karena beban utang tinggi dapat menekan bank sentral untuk mempertahankan suku bunga rendah, mencerminkan fenomena *fiscal dominance* (Corsetti et al., 2013). Pertumbuhan GDP menggambarkan kondisi ekonomi riil yang turut memengaruhi arah suku bunga; saat ekonomi tumbuh pesat, suku bunga biasanya dinaikkan untuk menghindari *overheating* (Bernanke & Mihov, 1998). Sehingga, dengan ketiga variabel diatas, persamaan sebagai berikut:

$$i_{it} = \alpha_1 + \beta_1 Exp Inf_{it} + \beta_2 GDP_{it} + \beta_3 GDP_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1.4)$$

4. HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Ekspektasi Inflasi di ASEAN-5

Menurut Teori Fisher, suku bunga nominal merupakan gabungan antara suku bunga riil dan ekspektasi inflasi (Fisher, 1930), sehingga ekspektasi inflasi menjadi elemen kunci dalam penentuan suku bunga oleh bank sentral. Stabilitas ekspektasi inflasi mencerminkan kredibilitas otoritas moneter dan memperkuat efektivitas kebijakan suku bunga dalam mencapai sasaran inflasi (Mishkin, 2007). Negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan respons kebijakan moneter terhadap tekanan inflasi, yang berdampak pada pembentukan ekspektasi inflasi masing-masing.



Gambar 3. Tingkat Ekspektasi Inflasi di ASEAN-5 (Sumber: IMF, 2025)

Berdasarkan Gambar 3, Indonesia mengalami fluktuasi ekspektasi inflasi yang signifikan, dengan lonjakan hingga 12% pada 2008, sebelum stabil di kisaran 7–9% pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, Thailand dan Filipina menunjukkan pola ekspektasi inflasi yang lebih stabil di bawah 5%, berkat kerangka *inflation targeting* yang kredibel,

koordinasi fiskal-moneter yang baik, serta stabilitas politik dan pengelolaan subsidi yang hati-hati.

Malaysia mencatat penurunan ekspektasi inflasi drastis hingga sekitar -10% pada 2008 akibat krisis global, yang menekan permintaan ekspor dan menurunkan aktivitas industri. Sementara itu, Vietnam mengalami lonjakan ekspektasi inflasi pada 2010, dipicu oleh kenaikan harga global, lonjakan permintaan domestik, serta kebijakan moneter ekspansif. Namun, ekspektasi tersebut mulai menurun seiring pengetatan moneter dan pengendalian harga pasca-2010.

Perkembangan Utang Pemerintah di ASEAN-5

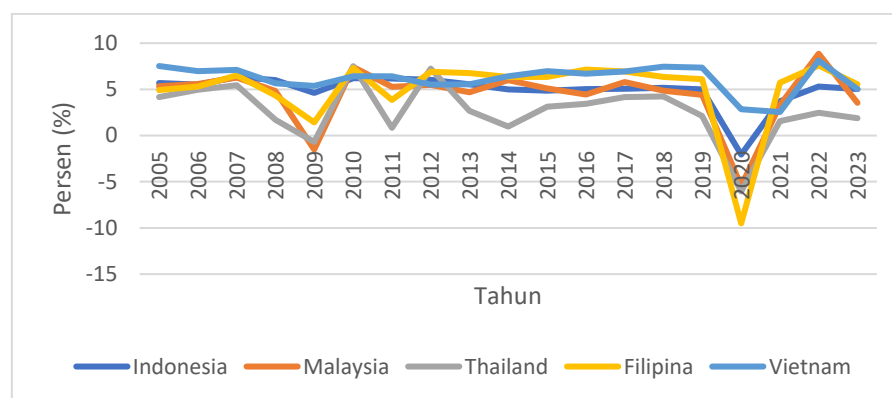
Kesinambungan fiskal dapat tercermin dari keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, namun lebih dominan terlihat melalui belanja pemerintah, khususnya dalam pembiayaan defisit yang ditutupi oleh utang (Ciplis et al., 2015). Peningkatan utang pemerintah berpotensi menimbulkan tekanan pada anggaran dan memengaruhi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga akibat persaingan antara sektor publik dan swasta dalam pasar dana. Selain itu, ekspektasi inflasi dan persepsi terhadap kredibilitas kebijakan moneter juga terpengaruh, khususnya jika utang dianggap tidak berkelanjutan, sehingga investor menuntut imbal hasil lebih tinggi (Fisher, 1930; Mishkin, 2007).

Struktur utang di ASEAN-5 menunjukkan perbedaan karakteristik. Indonesia didominasi oleh utang domestik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), dengan fokus pada jangka menengah-panjang dan strategi penguatan investor domestik. Malaysia memiliki struktur serupa, melalui MGS dan sukuk domestik, dengan risiko suku bunga relatif terkendali berkat dominasi investor institusional lokal. Filipina memiliki struktur utang yang seimbang antara domestik dan luar negeri, dengan strategi memperpanjang tenor dan memperdalam pasar keuangan domestik guna mengurangi ketergantungan pada utang valas. Thailand mengandalkan obligasi domestik berjangka menengah-panjang, dengan pasar obligasi yang kuat dan risiko nilai tukar yang rendah. Sementara itu, Vietnam masih relatif bergantung pada pinjaman luar negeri, namun secara bertahap mengembangkan pasar obligasi domestik serta memperkuat strategi pengelolaan utang jangka menengah. Secara keseluruhan, pengelolaan utang yang efektif dan struktur utang yang terkendali menjadi kunci dalam menjaga ruang fiskal, stabilitas moneter, dan kepercayaan investor di kawasan ASEAN-5.

Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5

Pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh

kondisi global, terutama krisis keuangan 2008 dan pandemi Covid-19. Indonesia mencatat pertumbuhan stabil 5–6% selama 2005–2019, dengan ketahanan cukup baik saat krisis 2008. Pandemi 2020 menyebabkan kontraksi -2,1%, namun pemulihan bertahap terlihat pada 2021 (3,7%) hingga 2023 (5,0%), didorong oleh konsumsi, ekspor komoditas, dan reformasi investasi. Malaysia tumbuh rata-rata 5% sebelum pandemi, didukung oleh sektor manufaktur dan ekspor. Kontraksi -5,6% terjadi pada 2020 akibat dampak global. Pemulihan kuat tercatat pada 2022 (8,7%) namun melambat ke 4,1% pada 2023 seiring menurunnya efek stimulus dan tekanan eksternal. Filipina menunjukkan pertumbuhan impresif >6% pada 2010-an, namun mengalami kontraksi tajam -9,5% pada 2020 akibat lockdown ketat. Pemulihan ekonomi berlangsung secara progresif: 5,7% (2021), 7,6% (2022), dan 5,5% (2023), dipacu oleh konsumsi, investasi, dan reformasi fiskal. Thailand tumbuh moderat (2–4%) sebelum pandemi, namun sangat terdampak pada 2020 (-6,1%) karena ketergantungan pada pariwisata dan ekspor. Pemulihan lambat: 1,5% (2021), 2,6% (2022), dan kembali turun ke 1,8% (2023), dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik dan tingginya utang rumah tangga. Vietnam menjadi negara dengan kinerja pertumbuhan paling solid. Selama 2005–2019, rata-rata PDB tumbuh 6–7%, didukung oleh FDI, ekspor, dan industrialisasi. Meski terdampak pandemi, Vietnam tetap tumbuh positif 2,9% (2020), naik menjadi 8,0% (2022), dan 5,2% (2023). Reformasi struktural dan integrasi global memperkuat ketahanan ekonominya.



Gambar 4. Tingkat Pertumbuhan GDP di ASEAN-5 (sumber: IMF, 2025)

Perkembangan Kebijakan Moneter di ASEAN-5

Negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam) memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan kebijakan moneter melalui suku bunga. Meskipun masing-masing negara memiliki konteks ekonomi yang berbeda, kebijakan suku bunga ini berfungsi untuk memengaruhi permintaan agregat dalam

perekonomian, mengendalikan laju inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank sentral di negara-negara tersebut, seperti Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand (BOT), dan State Bank of Vietnam (SBV), melakukan penyesuaian terhadap suku bunga berdasarkan kondisi ekonomi domestik dan global yang terus berubah, seperti fluktuasi harga energi dan pangan, serta faktor eksternal lainnya.

Tabel 1. Kebijakan Suku Bunga di ASEAN-5

Negara	Nama Suku Bunga	Tujuan Kebijakan Moneter	Nama Bank Sentral	Frekuensi Penetapan Suku Bunga
Indonesia	BI rate	Menstabilkan inflasi dan mengendalikan perekonomian	Bank Indonesia (BI)	Setiap 2 minggu (Rapat Dewan Gubernur BI)
Malaysia	OPR (<i>Overnight Policy Rate</i>)	Menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	Bank Negara Malaysia (BNM)	Setiap 6 minggu (rapat MPC)
Filipina	<i>Overnight Reverse Repurchase Rate</i> (RRP)	Menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan	Bangko Sentral ng Pilipinas	Setiap 6 minggu (rapat MPC)
Thailand	<i>1-Day Repurchase Rate</i>	Menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.	Bank of Thailand (BOT)	Setiap 6 minggu (rapat MPC)
Vietnam	<i>Refinancing Rate</i>	Menjaga stabilitas	State Bank of Vietnam	Setiap bulan (rapat

moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi.	(SBV)	dewan Direktur SBV)
---	-------	---------------------------

Sumber: Bank sentral ASEAN-5, 2025

Analisis Statistik Deskriptif

Mean untuk setiap variabel dalam dataset memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari masing-masing variabel cenderung berada di sisi positif distribusi

Tabel 2. Nilai Mean, Maksimum, Minimum, Standar Deviasi di ASEAN-5

	I	EXPINF	GD	GDP
Mean	4.665111	1.869556	4206.533	4.701222
Maks.	15.00000	28.49000	6976.000	8.120000
Min.	0.500000	-5.980000	41.00000	-9.510000
Std. Dev.	2.822039	5.422116	1226.979	2.900051
Obs.	90	90	90	90

Sumber: Lampiran 2, 2025

Pemilihan Model *Panel Least Square* (PLS)

Langkah analisis data berikutnya yaitu menentukan model data panel terbaik dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM

Pengujian Model	Prob.	Hasil
Uji Chow	0.0000	FEM
Uji Hausman	0.0000	FEM
Uji LM	0.0000	REM

Sumber: Lampiran 4, 2025, diolah

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi. Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Hasil menunjukkan nilai probabilitas $< 0,05$, sehingga hipotesis nol ditolak dan *Fixed Effect Model* dinyatakan lebih sesuai. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Dengan nilai probabilitas $< 0,05$, hipotesis nol kembali ditolak, yang menegaskan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model

paling tepat untuk estimasi dalam penelitian ini.

Analisis *Individual Effect*

Tabel 4. Uji Cross Id/*Individual Effect*

No	Negara	<i>Effect</i>
1.	Indonesia	1.809872
2.	Malaysia	-1.472816
3.	Thailand	-0.434169
4.	Filipina	-0.600264
5.	Vietnam	0.697376

Sumber: lampiran 5, 2025

Koefisien positif pada Indonesia dan Vietnam menunjukkan bahwa suku bunga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel dalam model (ekspektasi inflasi, utang pemerintah, dan pertumbuhan GDP), melainkan kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal lain, dengan asumsi variabel independen bersifat konstan. Artinya, meskipun tanpa perubahan pada variabel-variabel tersebut, suku bunga cenderung meningkat. Sebaliknya, koefisien negatif pada Malaysia, Thailand, dan Filipina mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga di negara-negara ini dipengaruhi oleh variabel dalam model. Artinya, ketika terjadi perubahan pada ekspektasi inflasi, utang pemerintah, atau pertumbuhan GDP, suku bunga mengalami peningkatan. Pengaruh tersebut tercermin dari besarnya koefisien pada *individual effect* masing-masing negara.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadinya penyimpangan pada persamaan regresi yang dihasilkan dan konsisten. Uraian secara rinci mengenai pengujian asumsi klasik pada model regresi data panel dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Uji Asumsi Klasik	Metode	Prob.	Keterangan
	Normalitas	Uji <i>Jarque-Bera</i>	0.668251	Normal
	Heteroskedastisitas	Uji Glejser	0.181436	Tidak Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 6,7, 2025

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	EXPINF	GD	GDP
EXPINF	1.000000	-0.131634	0.299789
GD	-0.131634	1.000000	-0.288050
GDP	0.299789	-0.288050	1.000000

Sumber: Lampiran 8, 2025, diolah

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas model estimasi. Uji normalitas dengan metode *Jarque-Bera* menunjukkan bahwa data terdistribusi normal (probabilitas = 0,668). Uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser* menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas sebesar 0,181. Untuk multikolinearitas, model dinyatakan bebas apabila nilai korelasi antar variabel independen $< 0,85$. Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa korelasi antara: *Ekspektasi inflasi dan utang pemerintah* = -0,131, *Ekspektasi inflasi dan GDP* = 0,299 dan *Utang pemerintah dan GDP* = -0,288. Seluruh nilai tersebut $< 0,85$, sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model.

Uji Statistik

Uji t

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 7. Uji t

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob	Kesimpulan
X1 (EXPINF)	0.290942	9.717627	0.0000	Signifikan
X2 (GD)	-0.000322	-2.305704	0.0235	Signifikan
X3 (GDP)	0.133551	2.289711	0.0245	Signifikan

Sumber: Lampiran 10, 2025

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap suku bunga. Variabel ekspektasi inflasi (EXPINF) memiliki nilai *t-statistic* sebesar 9,717 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), yang menunjukkan pengaruh signifikan. Variabel utang pemerintah (GD) juga berpengaruh signifikan terhadap suku bunga dengan *t-statistic* -2,305 dan probabilitas 0,0235 ($< 0,05$). Begitu juga dengan variabel pertumbuhan GDP menunjukkan pengaruh signifikan dengan *t-statistic* 2,289 dan probabilitas 0,0245 ($< 0,05$). Dengan demikian, ketiga variabel secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan suku bunga dalam model.

Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, diuji apakah variabel independen yaitu ekspektasi inflasi (X_1), utang pemerintah (X_2), dan pertumbuhan GDP (X_3) secara simultan berkaitan terhadap variabel dependen yaitu suku bunga (Y), dan apakah model tersebut sesuai atau tidak. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah

Tabel 8. Uji F

Statistik	Nilai
F-Statistik	28.80199
Probabilitas (p-value)	0.000000

Sumber: Lampiran 10, 2025, diolah

Berdasarkan tabel 8, diketahui nilai F-Statistik sebesar 28.801 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000, lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak, maka ekspektasi inflasi (X_1), utang pemerintah (X_2), dan pertumbuhan GDP (X_3) berpengaruh signifikan terhadap suku bunga (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai R^2 sebesar 0.483 (48,3%) dapat diinterpretasikan bahwa variabel ekspektasi inflasi (X_1), utang pemerintah (X_2), dan pertumbuhan GDP (X_3) menjelaskan variabel suku bunga (Y) sebesar 48,3% dan sisanya dipengaruhi variabel independen lain di luar penelitian sebesar 51,7%.

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara ekspektasi inflasi, utang pemerintah, dan pertumbuhan GDP terhadap kebijakan suku bunga di ASEAN-5. Pola hubungan yang ditemukan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan makroekonomi yang lebih adaptif dan terintegrasi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pengelolaan utang. Mengingat ekspektasi inflasi yang kuat berdampak pada kenaikan suku bunga, Bank Indonesia

harus memperkuat transparansi kebijakan moneter agar dapat meredam gejolak ekspektasi. Di sisi lain, strategi fiskal yang hati-hati sangat penting untuk mencegah dominasi fiskal yang bisa membatasi ruang gerak moneter.

Di Malaysia, implikasinya terletak pada perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap suku bunga, namun utang pemerintah memberikan tekanan negatif, stabilitas fiskal harus dijaga agar tidak melemahkan efektivitas kebijakan suku bunga ke depan.

Thailand menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas moneter di tengah peningkatan utang. Bank sentral perlu menyeimbangkan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan menjaga beban utang. Reformasi fiskal dan penguatan penerimaan negara dapat memberikan ruang bagi kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan kestabilan fiskal.

Bagi Filipina, tekanan utang yang tinggi membuat penyesuaian suku bunga menjadi dilematis. Implikasinya, Bank Sentral Filipina harus mengoptimalkan instrumen lain seperti komunikasi forward guidance dan operasi pasar terbuka untuk tetap menjaga ekspektasi inflasi tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga yang memperberat pembiayaan negara.

Vietnam menunjukkan bahwa respons moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan bisa berjalan efektif jika didukung oleh konsistensi fiskal. Namun, tantangan eksternal seperti volatilitas harga komoditas tetap harus diwaspadai. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan dan peningkatan efisiensi belanja publik menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung efektivitas kebijakan moneter.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh ekspektasi inflasi, pemerintah utang, dan pertumbuhan PDB terhadap kebijakan moneter di negara-negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Variabel ketiga ini merupakan faktor penting yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan moneter, khususnya dalam penetapan suku bunga dan pengendalian inflasi oleh bank sentral. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan dalam perkembangan ekspektasi inflasi, tingkat utang pemerintah, dan pertumbuhan PDB antar negara ASEAN-5 selama periode penelitian. Beberapa negara menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih ketat sebagai respons terhadap tekanan inflasi, sementara negara lain mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Tingkat utang pemerintah juga berbeda-beda, tergantung pada struktur

pembiayaan dan strategi pengelolaan utang masing-masing negara.

Dengan menggunakan metode Panel Least Square (PLS), hasil estimasi menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi dan pertumbuhan PDB berpengaruh secara positif signifikan terhadap kebijakan moneter, khususnya terhadap kenaikan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ekspektasi inflasi meningkat atau perekonomian tumbuh lebih cepat, bank sentral cenderung merespons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat guna menjaga stabilitas harga dan mencegah overheating. Sebaliknya, peningkatan utang pemerintah berkontribusi pada penurunan tingkat suku bunga, yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tekanan fiskal terhadap independensi kebijakan moneter—fenomena yang sering diasosiasikan dengan dominasi fiskal. Setiap negara menunjukkan respons kebijakan yang khas. Di Indonesia, Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui suku bunga SBI dan BI Rate, meskipun tetap rentan terhadap guncangan eksternal seperti kenaikan harga pangan dan energi. Malaysia menampilkan pendekatan yang adaptif dengan menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan, serta koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Thailand menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama stabilitas perekonomian, namun peningkatan utang pemerintah membatasi efektivitas kebijakan tersebut. Di Filipina, kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi menciptakan dilema karena turut memperberat beban utang pemerintah. Sementara itu, Vietnam menunjukkan langkah maju dalam pengelolaan dengan menyesuaikan utang suku bunga secara proaktif, meskipun tetap menghadapi risiko inflasi akibat volatilitas global.

Saran

Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan penting bagi negara-negara ASEAN-5. Pertama, bank sentral perlu lebih responsif terhadap dinamika ekspektasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam merumuskan kebijakan suku bunga. Transparansi dan kebijakan komunikasi yang baik akan membantu mengelola ekspektasi publik dan meningkatkan kredibilitas bank sentral. Kedua, pemerintah perlu menjaga kehausan fiskal dengan mengelola utang secara hati-hati, agar tidak membatasi ruang gerak kebijakan moneter. Koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting agar pelanggaran suku bunga tidak menciptakan ketergantungan fiskal terhadap kebijakan moneter. Ketiga, penguatan struktur ekonomi domestik perlu terus didorong untuk meningkatkan ketahanan makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan PDB yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan yang saling melengkapi antara otoritas fiskal dan moneter, sekaligus mengantisipasi tekanan eksternal seperti krisis global atau pandemi di masa depan.

REREFENSI

- Alvinasab, S. M. (2016). *Monetary policy and economic growth: A case study of Iran. International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 234–243.
- Bianchi, F., & Melosi, L. (2017). The dire effects of the lack of monetary and fiscal coordination. *Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper*, No.2017-19.
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707.
- Cochrane, John H. “Fiscal Theory and Political Economy.” *Princeton University Press*, 2023.
- Fisher, Irving. “The Theory of Interest: As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It.” *Macmillan*, 1930.
- Galí, J. (2008). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework*. Princeton University Press.
- Ghazali, M. F., & Ismail, N. (2019). *The effects of interest rate changes on consumption and investment in ASEAN economies*. *Asian Economic and Financial Review*, 9(1), 123–135.
- Granville, B., & Mallick, S. (2004). Fisher hypothesis: UK evidence over a century. *Applied Economics Letters*, 11(2), 87–90.
- Hyman, David N. *FEDERAL STATE AND LOCAL GOVERNMENT FEDERAL STATE AND LOCAL TOTAL YEAR Apago PDF Enhancer*. 2011, p. 808.
- Leeper, E. M. (1991). Policy rules, information, and fiscal effects in a Ricardian world. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 34, 265–296.
- Leeper, E. M. (2016). Fiscal policy and inflation. *Annual Review of Economics*, 8, 51–76.
- Mankiw, N. Gregory. 2016. *Macroeconomics*. 9th ed. New York: Worth Publisher
- Mishkin, F. S. (2015). *Macroeconomics: Policy and Practice* (2nd ed.). Boston: Pearson.
- Nasir, M. A., Qori’ah, C. G., Wardhono, A., Lestari, S. A., & Indrawati, Y. (2013). ASEAN economic and monetary integration: The feasibility of the optimum currency area. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis* (pp. 1–18). Universitas Jember.
- Rahman, M. M., & Aziz, M. A. (2021). *Public debt, interest rates, and central bank policy conflicts in emerging markets*. *Emerging Markets Finance & Trade*, 57(10), 2831–2850.
- Srithilat, K., & Sun, G. (2017). *The impact of monetary policy on economic development:*

- evidence from Lao PDR*. Global Journal of Human-Social Science: Economics, 17(2), 9–16.
- Wardhono, A. (2015). *Studi kesinambungan fiskal pada variabel makro ekonomi Indonesia: Analisis VAR*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT), 8(2), 113–121.
- Warjiyo, P. (2003). *Kebijakan moneter di Indonesia: Teori dan praktik*. Penerbit Salemba Empat.
- Wulandari, F. (2022). *Ekspektasi inflasi dan transmisi kebijakan moneter di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 101–115.



Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Dengan Menggunakan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) Di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo

**Vindi Diah Fatika Sari^{1*}, Aisah Jumiaty¹, Fajar Wahyu Prianto¹,
Dwi Perwitasari Wiryaningtyas¹**

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia

* Corresponding Author: vindidiahfs14@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the development of the Kampung Blekok tourism village in Situbondo Regency using the Sustainable Livelihood Approach (SLA). This approach includes five types of capital

assets: human capital, natural capital, physical capital, financial capital, and social capital, while also taking into account aspects of vulnerability, institutional structures, and sustainability strategies. The research uses an exploratory qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that natural capital has the highest score in the development process, while financial capital remains low. Strengthening strategies through community training, improvement of tourism facilities, and environmental conservation are key to achieving sustainable development in Kampung Blekok.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA). Pendekatan ini mencakup lima modal aset yaitu modal manusia, modal alam, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial, serta memperhatikan aspek kerentanan, struktur kelembagaan, dan strategi keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal alam memiliki skor tertinggi dalam pengembangan, sementara modal finansial masih rendah. Strategi penguatan melalui pelatihan masyarakat, peningkatan fasilitas wisata, dan pelestarian lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kampung Blekok.

Informasi Naskah

Submitted: 26 Juni 2025

Revision: 5 September 2025

Accepted: 3 Oktober 2025

Kata Kunci: Desa Wisata, *Sustainable Livelihood Approach*, Kampung Blekok, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata telah tumbuh menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan menjadi sumber devisa utama bagi berbagai negara. Peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi dinilai cukup besar. Tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah muncul sebagai sumber penting dari dinamika masyarakat dan salah satu pendorong perubahan sosial budaya yang paling penting (Pitana, I. Gede dan Gayatri, 2005). Di Indonesia, desa wisata dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Hal tersebut karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan di desa ini memiliki potensi sumber daya manusia dan alam. Desa wisata didirikan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi sebagai pelaku langsung, meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat dalam potensi dan daya tarik wisata yang ada di daerahnya, dan menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung.

Pembangunan pedesaan harus mengikuti prinsip transparansi, partisipasi, aksesibilitas masyarakat, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat harus dilibatkan untuk menentukan visi pembangunan masa depan yang ingin diwujudkan (Nisa, 2023). Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam program pembangunan kepariwisataan, hal ini seperti merupakan label baru yang melekat pada seluruh pembuatan kebijakan dan proyek pembangunan kepariwisataan. Di mana pembangunan pariwisata tanpa keterlibatan masyarakat hanya akan menghasilkan produk wisata yang nilainya kecil bagi masyarakat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan dengan partisipatif masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk memperkuat potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal.

Salah satu wilayah khususnya di Jawa Timur yaitu Wilayah Kabupaten Situbondo dimana pembangunan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Di Kabupaten Situbondo tersebut terdapat desa wisata yaitu Kampung Blekok. Kampung Blekok di Situbondo merupakan contoh nyata dari inisiatif desa wisata berbasis ekowisata, yang dikembangkan dengan pendekatan partisipatif dan konservasi. Kampung Blekok merupakan wisata baru dengan konsep konservasi hutan mangrove dan burung blekok. Dimana pembangunan wisata ini diharapkan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat melalui wirausaha dan mensejahterahkan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Kampung Blekok ini cukup besar. Masyarakat Kampung Blekok telah terlibat sejak tahap awal perencanaan pengembangan desa wisata. Partisipasi tersebut di bawah naungan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis Kampung Blekok menjadi wadah partisipasi formal masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Pengembangan desa wisata perlu strategi agar dapat menjadikan wisata tersebut berkelanjutan. Strategi tersebut harus dapat dilakukan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitar. Sehingga dalam mencari strategi tersebut dapat dilakukan dengan

menggunakan kerangka kerja *Sustainable Livelihood Approach*. Hal tersebut karena dengan adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentagonal asset dalam pengembangan desa, menganalisis aspek kerentanan dalam pengembangan desa wisata, menganalisis transformasi proses dan struktur dalam pengembangan desa wisata, merumuskan strategi dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Desa Wisata

Desa wisata adalah pengembangan kawasan desa yang tidak mengubah secara mendasar yang telah ada, tetapi bertujuan untuk mengembangkan potensi desa yang telah ada dengan menggunakan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi berbagai kegiatan wisata dan dapat memenuhi beberapa kebutuhan wisata dalam hal daya tarik dan fasilitas penunjang (Muljadi, 2012). Pengelolaan kepariwisataan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan dengan memperhatikan segala sumber daya yang tersedia. Tipe pengelolaan desa wisata di Indonesia terbagi menjadi tipe terstruktur dan tipe terbuka (Hadiwijoyo, 2012).

Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam pengembangan desa wisata. Sumber daya dan tradisi serta budaya unik yang terkait dengan komunitas ini adalah kekuatan pendorong utama di balik aktivitas desa wisata. Di sisi lain, keberhasilan pengembangan desa wisata bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat setempat, sehingga masyarakat lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan objek wisata menjadi bagian dari ekosistem yang terhubung. Masyarakat setempat berperan sebagai tuan rumah dan menjadi aktor penting dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi (Wearing, Stephen and McDonald, 2001).

2.2 Partisipasi Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu konsep yang menggambarkan peran penting masyarakat dalam pembangunan pariwisata, yang biasa disebut dengan *Community Based Tourism (CBT)*. Konsep *Community-Based Tourism (CBT)* menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan pembangunan yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama, sehingga mereka memiliki kontrol, partisipasi, dan manfaat langsung dari aktivitas wisata (Ardika, 2018). Prinsip *CBT* tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kelestarian budaya dan alam.

Dalam *CBT* masyarakat memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dan terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata (Prasiasa, 2012). Hal ini mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan adil karena manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat lokal.

2.3 Sustainable Livelihood Approach

Sustainable livelihood pertama kali diperkenalkan oleh *Brundtland Commission on Environment and Development*. Selain itu dinyatakan bahwa *sustainable livelihood* dapat berfungsi sebagai integrator yang memungkinkan kebijakan untuk secara bersamaan menangani pembangunan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan (Morse, 2013). Suatu penghidupan dianggap berkelanjutan jika dapat mengatasi dan meningkatkan tekanan dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan keterampilan dan kekayaan, serta memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, tanpa merusak basis sumber daya alam. Begitupun jika suatu masyarakat hanya mengandalkan tenaga tanpa mengembangkan teknologi yang efisien, maka hasil yang dapat dicapainya akan terus menurun seiring waktu karena masa produksi manusia secara fisik terbatas (DFID, 1999).

Di dalam *Sustainable Livelihood Approach* terdapat kerangka kerja yang berisi beberapa aspek. Kerangka *Sustainable Livelihood* menggambarkan faktor-faktor terpenting yang memengaruhi penghidupan masyarakat dan hubungan khusus antara faktor-faktor tersebut. Dengan bantuan kerangka ini, kegiatan pembangunan baru dapat direncanakan dan bagian dari kegiatan yang ada dalam keberlanjutan penghidupan dapat dievaluasi. Kerangka tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penghidupan yang dapat dikelola dan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Secara tidak langsung, Kerangka Kerja ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dari perencanaan. Di mana proses perencanaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, lingkungan fisik, masalah manusia yang ada, situasi keuangan dan sumber daya alam (Wigati, 2013).

Dalam kerangka kerja *Sustainable Livelihood* terdapat konten kerentanan guncangan (*shocks*), tren (*trends*), dan musiman (*seasonality*). Dalam situasi ini, masyarakat hidup dan bergantung pada berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup, seperti modal alam (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), modal ekonomi (*financial capital*) dan modal sosial (*social capital*). Akses terhadap aset yang dimiliki dipengaruhi oleh undang-undang yang ada, kelembagaan yang berlaku, kebudayaan yang berlaku, kehidupan sosial yang berlaku dan lingkungan politik yang mempengaruhi perencanaan strategi penghidupan berkelanjutan.

3. METODE

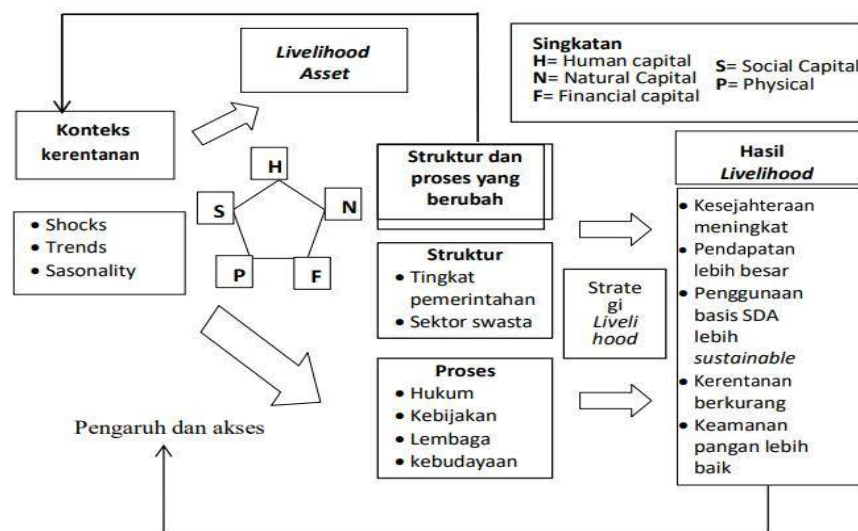
3.1. Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian tipe eksploratif, bertujuan memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, menggambarkan fenomena sosial, dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci atau mengembangkan hipotesis bukan menguji hipotesis (Mudjiyanto, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpulan data sebagai sumber informasi yang dapat dicari langsung ke subjek. Data

dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih meliputi Kepala Desa, Pengelola Wisata dan masyarakat lokal yang memahami benar tentang Kampung Wisata Blekok.

3.2. Teknik Analisis

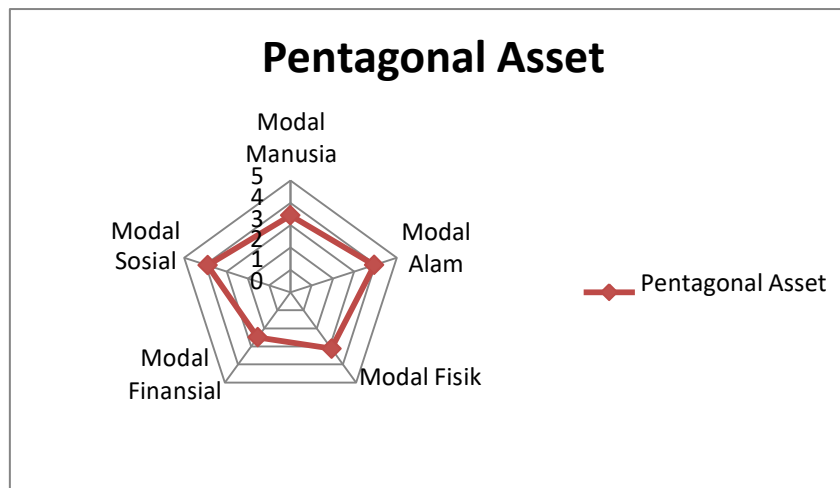
Data dianalisis menggunakan kerangka kerja pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) yang meliputi analisis terhadap lima modal penghidupan yaitu modal manusia, modal alam, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial, konteks kerentanan (*shocks, trends, seasonality*), serta struktur dan proses kelembagaan. Penilaian kuantitatif terhadap masing-masing modal dilakukan menggunakan skala Likert untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan aset yang dimiliki masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Kerja Sustainable Livelihood Approach

4. HASIL DAN DISKUSI

Pendekatan *Sustainable Livelihood* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelima aset memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata Kampung Blekok. Modal alam memiliki skor tertinggi yaitu (3,95), menunjukkan besarnya potensi hutan mangrove dan habitat burung blekok sebagai daya tarik utama. Modal sosial (3,9), mencerminkan hubungan sosial dan kolaborasi antara warga, pokdarwis, dan pemerintah desa. Modal manusia memperoleh nilai (3,44), meskipun masih terdapat keterbatasan pada tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di bidang pariwisata. Modal fisik juga cukup kuat (3,13) namun menghadapi tantangan infrastruktur seperti jembatan kayu yang rusak. Sedangkan modal finansial memiliki nilai terendah (2,5) karena pendapatan masyarakat yang belum stabil dan ketergantungan pada sektor informal. Strategi penguatan modal finansial dan fisik menjadi prioritas pengembangan selanjutnya.



Gambar 2. Pentagonal Aset Kampung Blekok

Tabel 1. Parameter Pentagonal Aset

Kategori	Parameter
Modal Manusia	Pendidikan, Pengetahuan Tentang Wisata, Kesadaran Potensi Wisata, Pengetahuan Manajemen Wisata, Pelayanan Layanan Wisata
Modal Alam	Kondisi Flora, Kondisi Fauna, Kondisi Sumber Mata Air, Kondisi Lahan
Modal Fisik	Kondisi Jalan, Kondisi Infrastruktur, Infrastruktur Layanan Wisata
Modal Finansial	Pendapatan, Akses Kredit
Modal Sosial	Promosi Wisata, Partisipasi Masyarakat

Sumber: data primer, 2025

Dalam pengembangan wisata Kampung Blekok ini dengan pendekatan *Sustainable Livelihood Approach (SLA)* merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Kampung Blekok, yang dikenal dengan keberadaan burung blekok dan keanekaragaman hayati di kawasan mangrove, memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata yang mendukung pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

Kampung Blekok tentunya memiliki kelima asset *SLA* yaitu modal manusia, modal alam, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial. Berdasarkan hasil dari penelitian, kelima modal tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Modal manusia mencakup pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Masyarakat di wisata Kampung Blekok memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga beberapa masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang terutama di bidang pariwisata. Modal alam memiliki nilai skala paling tinggi diantara kelima modal. Hal itu karena Kampung Blekok termasuk ke dalam ekowisata yang mengutamakan kelestarian alam. Selain kelestarian alam, budaya lokal di Kampung Blekok juga perlu dilestarikan. Kampung Blekok ini memiliki area mangrove yang

tergolong luas, dimana di tumbuh dengan berbagai macam jenis mangrove. Kondisi hutan mangrove sendiri juga sangat baik, terbukti dengan banyaknya burung blekok atau burung air yang menjadikannya habitat mereka. Modal alam seperti ekosistem mangrove dan populasi burung blekok menjadi daya tarik utama.

Modal fisik dari Kampung Blekok meliputi infrastruktur daerah dan layanan wisata. Infrastruktur jalan masih terdapat banyak jalan yang berlubang dan fasilitas yang kurang memadai. Seperti Jembatan kayu yang beberapa kali mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terkena banjir. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kualitas kayu yang dipilih ketika melakukan pembangunan dan perbaikan. Sementara itu, aset fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas sanitasi, papan informasi, dan tempat observasi burung perlu dikembangkan untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Modal finansial sendiri memiliki nilai paling rendah dibandingkan modal yang lain. Hal itu karena rata – rata pendapatan masyarakat di Kampung Blekok relative rendah. Pengembangan wisata bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas seperti penangkapan ikan atau pertanian.

Modal sosial yang meliputi jaringan, kepercayaan, dan norma sosial juga sangat penting. Kegiatan wisata di Kampung Blekok perlu dikoordinasikan oleh kelembagaan lokal, seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini mendukung pembagian manfaat secara adil dan transparan. Konteks kerentanan di Kampung Blekok terdiri dari guncangan yaitu banjir dan cuaca ekstrem, tren yaitu degradasi lingkungan dan minimnya dukungan pemerintah, dan faktor musiman, perubahan musim yang memengaruhi pertanian dan pariwisata. Guncangan alam seperti banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur dan penurunan pengunjung, sedangkan fluktuasi pendapatan nelayan dan petani menjadi tantangan ekonomi masyarakat. Kecenderungan alih fungsi lahan mangrove dan pencemaran lingkungan berisiko mengancam keberlanjutan destinasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi adaptif yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tekanan. Transformasi sosial dan kelembagaan terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi, serta keterlibatan pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pelatihan. Kontribusi PT. Paiton Energy dan peran pokdarwis menjadi kunci dalam membangun sinergi kelembagaan yang mendukung pengelolaan wisata berkelanjutan. Distribusi manfaat melalui sistem bagi hasil memperlihatkan upaya menuju keadilan ekonomi lokal.

Strategi pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dilakukan berdasarkan kelima modal untuk meningkatkan dan mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan serta meminimalkan resiko dari kerentanan. strategi yang pertama adalah memanfaatkan potensi alam dengan maksimal dalam hal ini adalah hutan mangrove dan burung blekok. Hal itu karena modal alam memiliki nilai skala paling tinggi diantara yang lain.

Strategi dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai wisata harus dirancang secara berkelanjutan, agar potensi alam tetap lestari dan mampu memberikan manfaat

ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Strategi pemanfaatan modal alam difokuskan pada pengelolaan yang lestari melalui pendekatan berbasis komunitas. Masyarakat perlu didorong untuk ikut serta dalam kegiatan pelestarian seperti penanaman mangrove, pemantauan habitat burung, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Edukasi kepada pengunjung pun menjadi bagian penting dari upaya konservasi agar nilai ekologis tetap terjaga. Selain melakukan penanaman bibit pohon mangrove secara berkala, juga dapat dilakukan pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari ekosistem mangrove. Larangan membuang sampah sembarangan juga harus lebih dipertegas lagi karena sangat mencemari habitat dari burung blekok ini.

Kedua, Modal fisik merupakan infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan. Strategi peningkatan modal fisik difokuskan pada rehabilitasi dan pengembangan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, toilet, pusat informasi, dan tempat parkir. Melakukan perbaikan fasilitas utama dan fasilitas umum agar wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Sebagai contoh perbaikan jembatan kayu yang mengelilingi area hutan mangrove. Pemilihan kayu yang digunakan juga harus yang berkualitas agar bisa digunakan jangka panjang dan kuat dari kemungkinan bencana banjir. Kondisi jembatan kayu yang sering rusak akibat banjir menjadi prioritas utama untuk diperbaiki dengan bahan dan desain yang lebih tahan cuaca.

Ketiga, strategi penguatan modal manusia di Kampung Blekok bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Pendidikan formal dan nonformal menjadi kunci, terutama karena mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah pertama. Memberikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Banyak potensi wisata yang tidak berkembang maksimal karena lemahnya pengelolaan. Maka, strategi yang tepat adalah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang aktif dan didampingi oleh tenaga ahli di bidang manajemen pariwisata

Keempat, memaksimalkan pengembangan UMKM masyarakat untuk menambah pendapatan mereka. Pengembangan UMKM di Kampung Blekok sangat strategis mengingat wilayah kaya akan hasil lautnya karena merupakan daerah pesisir. Masyarakat bisa membuat produk dari olahan hasil laut yang memungkinkan menjadi makanan khas daerah ini. Selain itu juga dapat memanfaatkan kerajinan tangan dari kayu atau kerang. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan seperti kerajinan tangan harus terus didorong. Strategi yang tepat adalah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM kreatif, mulai dari pelatihan desain produk, pengemasan, hingga pemasaran digital. Pemerintah dapat memfasilitasi akses pasar melalui festival, pameran, dan platform *e-commerce*. Selain itu, labelisasi produk dan sertifikasi mutu juga bisa meningkatkan daya saing kerajinan, sehingga menjadi daya tarik tambahan dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung.

5. SIMPULAN

Pengembangan wisata Kampung Blekok melalui pendekatan *Sustainable Livelihood*

Approach menekankan pentingnya pengelolaan aset secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kelima pentagonal asset yang ada di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, yang memiliki nilai skala paling tinggi yaitu modal alam karena memanfaatkan potensi alam, lalu modal sosial, modal manusia, modal fisik, yang terakhir modal finansial. Beberapa modal sudah cukup kuat untuk memanfaatkan potensi yang ada, hanya butuh dukungan dari beberapa pihak. Namun, masih terdapat modal yang lemah terutama modal finansial karena beberapa masyarakat masih mengandalkan pekerjaan sebagai nelayan. Modal alam dan fisik merupakan kekuatan utama, namun kelemahan pada finansial membutuhkan perhatian lebih lanjut. Perlu strategi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menciptakan ekowisata yang berkelanjutan.

Terdapat tiga macam tingkat kerentanan di Kampung Blekok Kabupaten Situbondo yaitu guncangan (*shocks*) yang terdapat di Kampung Blekok berkaitan dengan bencana alam yaitu banjir. Banjir tersebut terjadi karena adanya curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan volume air meluap. Kedua, kerentanan musiman (*seasonality*) yaitu perubahan musim yang memengaruhi pekerjaan masyarakat. Dan yang terakhir kerentanan dengan konteks kecenderungan (*trends*) yang terdapat di Kampung Blekok adalah kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah. Dalam pembangunan wisata Kampung Blekok ini terdapat beberapa pihak yang ikut berkontribusi dan berperan penting yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten merupakan sumber pendanaan utama, sumber pendanaan juga dilakukan oleh pihak swasta yaitu CSR PT. Paiton Energy, Pemerintah Desa juga ikut berkontribusi melalui bumdes.

Strategi berkelanjutan dilakukan berdasarkan kelima modal aset untuk meningkatkan dan mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan serta meminimalkan resiko dari kerentanan. Strategi tersebut antara lain:

1. Memanfaatkan potensi alam dengan maksimal dalam hal ini adalah hutan mangrove dan burung blekok.
2. Memaksimalkan pengembangan UMKM masyarakat lokal untuk menambah pendapatan mereka.
3. Memberikan sosialisasi berupa pelatihan untuk menunjang keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal.
4. Melakukan perbaikan infrastruktur, fasilitas utama dan fasilitas umum agar wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman.

REREFENSI

- Ardika, I. G. (2018). *Kepariwisata Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas*. Kompas Gramedia.
- DFID. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Graha Ilmu.
- Morse, and M. (2013). *Sustainable Livelihood Approach: A Critique of Theory and Practice*. Springer.

- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study. *Studi komunikasi dan media*, 22(1), 65.
- Nisa, A. F. (2023). *Pembangunan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Di Desa Adat Osing, Kabupaten Banyuwangi (Perspektif SLA/Sustainable Livelihood Approach)*. Univrsitas Jember.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi.
- Prasiasa, D. P. O. (2012). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Salemba Humanika.
- Wearing, Stephen and McDonald, M. (2001). The Development of Community-based Tourism: Re-thinking the Relationship Between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Wigati, S. (2013). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan: Study Kasus pada Pendampingan Kuliah Kerja Nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. *Jurnal Dakwah*, XIV(2).



ANALISIS PENGARUH PARIWISATA, KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ASEAN-5

Shine Elverda

¹ Universitas Jember, Jember, Indonesia

* Corresponding Author: shineelverdaa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of tourist arrivals, tourism receipts, trade openness, and education on poverty levels in the ASEAN-5 between 2000 and 2023. Poverty levels in the ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam) remain a significant challenge despite the region's significant economic potential, particularly in the tourism and trade sectors. The analysis was conducted using secondary data from the World Bank and United Nations Development Programme and processed using E-Views 12. The results indicate that tourist arrivals have a positive and significant effect on poverty, while tourism receipts and trade openness have a negative and significant effect. These findings emphasize the importance of equitable distribution of economic benefits for these sectors to truly impact poverty alleviation. Furthermore, mean years of schooling were also found to have a negative and not significant effect on poverty, underscoring the role of education in improving the quality of human resources. This study provides policy recommendations to maximize the potential of tourism and trade in an inclusive and sustainable manner to reduce poverty in the ASEAN-5 region.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan kunjungan wisatawan, penerimaan pariwisata, keterbukaan perdagangan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-5 antara tahun 2000 hingga 2023. Tingkat kemiskinan di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) masih menjadi tantangan besar meskipun kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dari sektor pariwisata dan perdagangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari World Bank dan United Nations Development Programme dan diolah menggunakan perangkat lunak E-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan penerimaan pariwisata dan keterbukaan

Informasi Naskah

Submitted: 28 Juli 2025

Revision: 14 September 2025

Accepted: 2 Oktober 2025

Kata Kunci: Kemiskinan,
Pariwisata, Keterbukaan
Perdagangan, Rata-rata Lama
Sekolah

perdagangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang merata agar sektor-sektor tersebut benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan. Selain itu, rata-rata lama sekolah juga ditemukan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan peran pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan dalam rangka pengurangan kemiskinan di kawasan ASEAN-5.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam). Meskipun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dalam dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan, ketidaksetaraan akses layanan dasar, dan kerentanan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup sektor ekonomi strategis seperti pariwisata, perdagangan internasional, dan pendidikan. Pariwisata telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Kehadiran wisatawan tidak hanya meningkatkan permintaan barang dan jasa lokal, tetapi juga menstimulasi investasi infrastruktur, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan efek pengganda ekonomi. Konsep Pro-Poor Tourism menekankan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ini dapat diarahkan untuk mendukung masyarakat miskin secara langsung. Meskipun demikian, efektivitas pariwisata dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh distribusi manfaat dan kapasitas lokal dalam menyerap dampaknya.

Di sisi lain, keterbukaan perdagangan sebagai indikator globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor dan partisipasi dalam rantai nilai global. Perdagangan bebas diyakini dapat memperluas pasar, menciptakan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan. Namun, hasil empiris menunjukkan adanya variasi dampak, tergantung pada struktur ekonomi nasional, tingkat keterampilan tenaga kerja, dan kebijakan redistribusi pemerintah. Dalam konteks pembangunan inklusif, pendidikan menjadi faktor kunci yang menjembatani pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pendidikan yang memadai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka akses ke pekerjaan formal, dan memperbesar peluang partisipasi dalam sektor-sektor produktif seperti pariwisata dan perdagangan. Indikator seperti rata-rata lama sekolah sering digunakan untuk merepresentasikan kualitas pendidikan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan literatur menunjukkan adanya perbedaan temuan empiris terkait pengaruh pariwisata, perdagangan, dan pendidikan terhadap kemiskinan. Beberapa studi menyatakan bahwa sektor-sektor tersebut berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan, namun tidak sedikit pula yang menemukan dampak yang lemah atau tidak signifikan. Inkonsistensi ini mengindikasikan perlunya analisis lebih

lanjut yang mempertimbangkan konteks regional dan dinamika waktu. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pariwisata (kunjungan wisatawan dan penerimaan pariwisata), keterbukaan perdagangan, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN dalam periode 2000–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam literatur pembangunan ekonomi dengan menyoroti peran sektor strategis dalam pengentasan kemiskinan di ASEAN-5.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pro-Poor Tourism

Pro-Poor Tourism (PPT) merupakan pendekatan pariwisata yang bertujuan menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat miskin, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pendekatan ini tidak menekankan distribusi keuntungan, tetapi selama kelompok miskin mendapatkan manfaat, maka praktik tersebut dikategorikan sebagai *Pro-Poor Tourism* (Ashley et al., 2001). Strategi ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mendorong partisipasi inklusif masyarakat lokal dalam ekonomi formal (Harrison, 2008). Dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur kontribusi sektor ini terhadap pengentasan kemiskinan adalah kunjungan wisatawan dan penerimaan pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mencerminkan potensi permintaan, namun dalam konteks PPT, penting untuk menilai sejauh mana kunjungan tersebut membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendukung pelaku usaha mikro lokal (Darmawan & Yunanto, 2016). Sementara itu, penerimaan pariwisata perlu dianalisis dari sisi distribusi, agar pendapatan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga mengalir kepada masyarakat miskin melalui peran aktif dalam ekosistem pariwisata (Astiyanti, 2017).

Teori Stolper-Samuelson

Teori Stolper-Samuelson yang dikembangkan oleh Stolper dan Samuelson (1941) merupakan pengembangan dari model Heckscher-Ohlin, dan menjelaskan dampak liberalisasi perdagangan terhadap distribusi pendapatan antar faktor produksi. Ketika perdagangan dibuka, negara akan memperoleh keuntungan dari faktor produksi yang melimpah, sementara faktor yang langka mengalami penurunan pendapatan. Dalam konteks negara berkembang dengan kelebihan tenaga kerja tidak terampil, keterbukaan perdagangan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja tersebut, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Winters, 2002). Teori ini relevan dengan SDG 10 (pengurangan ketimpangan) dan SDG 17 (kemitraan global untuk pembangunan).

Teori Modal Manusia oleh Gary Becker

Teori Modal Manusia oleh Becker (1964) menyatakan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Pendidikan memungkinkan peningkatan keterampilan dan peluang kerja, sehingga mendukung pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini, *Mean Years of Schooling* (MYS) digunakan sebagai indikator modal manusia. MYS yang tinggi mencerminkan kapasitas individu untuk mengakses sektor formal seperti pariwisata dan perdagangan. Pendidikan juga memperluas kapabilitas individu dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan kesejahteraan jangka panjang (Becker, 1964). Hal ini sejalan dengan SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan.

3. METODE

3.1. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari *World Development Indicator* oleh *World Bank* dan *United Nations Development Programme* di ASEAN-5 pada periode tahun 2000 hingga 2023. Variabel dependen adalah Tingkat Kemiskinan (POV) merupakan proksi dari indikator kemiskinan yang digambarkan dalam rasio jumlah penduduk miskin multidimensi dan dinyatakan dalam satuan persentase dari total populasi. Variabel independen terdiri dari Kunjungan Wisatawan (TOUR) adalah proksi dari pariwisata berupa pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional setiap tahunnya dan dinyatakan dalam satuan persen, Penerimaan Pariwisata (RE) adalah proksi dari pariwisata berupa jumlah penerimaan pariwisata di negara tujuan dan dinyatakan dalam satuan US\$ konstan 2015. Tingkat Keterbukaan Perdagangan (TRD) adalah proksi dari perdagangan internasional yang mencerminkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam perdagangan global berupa rasio total nilai ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dinyatakan dalam satuan persen. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah proksi dari pendidikan yang diukur dalam jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Data ini menggambarkan kualitas modal manusia dan dinyatakan dalam satuan tahun.

3.2. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel *Fixed Effect Model* untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Berikut spesifikasi model yang digunakan dalam estimasi regresi penelitian

ini:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 TOUR_{it} + \beta_2 LnRE_{it} + \beta_3 TRD_{it} + \beta_4 MYS_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

POV	= Tingkat kemiskinan (% dari populasi)
TOUR	= Kunjungan wisatawan (% pertumbuhan setiap tahun)
RE	= Penerimaan pariwisata (US\$ konstan 2015)
TRD	= Tingkat keterbukaan perdagangan (% PDB)
MYS	= Rata-rata lama sekolah (tahun)
i	= cross section
t	= time series
β_0	= Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien
ε	= error term
Ln	= logaritma natural

4. HASIL DAN DISKUSI

Hasil estimasi regresi dengan *Fixed Effect Model* menunjukkan pengaruh Pariwisata, Keterbukaan Perdagangan, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di ASEAN-5 pada tahun 2000-2023 dengan persamaan sebagai berikut:

$$POV = 97.211338 + 0.00072678087*TOUR - 0.68347451*LNRE - 0.070146393*TRD - 5.6102616*MYS + [CX=F]$$

Berdasarkan hasil hasil regresi, konstanta model sebesar 97,21 menunjukkan bahwa tanpa perubahan pada variabel independen, tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 97,21%. Variabel kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan 1% kunjungan wisatawan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,0007%. Sebaliknya, pendapatan pariwisata, keterbukaan perdagangan, dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan 1% pendapatan pariwisata menurunkan kemiskinan sebesar 0,68%, keterbukaan perdagangan menurunkan sebesar 0,07%, dan rata-rata lama sekolah menurunkan sebesar 5,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memberikan kontribusi terbesar dalam pengurangan kemiskinan.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	97.21134	7.753672	12.53746	0.0000
TOUR	0.000727	0.000105	6.944146	0.0000
LNRE	-0.683475	0.353927	-1.931118	0.0659
TRD	-0.070146	0.013668	-5.132196	0.0000
MYS	-5.610262	0.205812	-27.25911	0.0000
Effects Specification				

Sumber: Diolah

Penelitian ini mengkaji pengaruh kunjungan wisatawan, penerimaan pariwisata, keterbukaan perdagangan, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-5 periode 2000–2023. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak semua indikator pariwisata secara konsisten menurunkan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa relasi antara pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bersifat kompleks, tergantung pada konteks kelembagaan, inklusivitas kebijakan, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Pertama, kunjungan wisatawan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini bertentangan dengan teori Pro-Poor Tourism, yang menyatakan bahwa pariwisata dapat mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan studi Torres & Momsen (2004) serta Mbaiwa (2005), yang menunjukkan bahwa pariwisata yang bersifat eksklusif justru memperbesar ketimpangan karena manfaatnya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa tata kelola yang inklusif, peningkatan kunjungan wisatawan justru memperdalam eksklusi sosial dan ekonomi.

Kedua, penerimaan pariwisata berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meski arah hubungan sesuai dengan teori spillover dan Pro-Poor Tourism, namun tidak signifikannya pengaruh menandakan adanya hambatan distribusi manfaat di masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memperoleh pendapatan dari pariwisata, mekanisme transmisi ke kelompok miskin belum berjalan optimal. Temuan ini mendukung analisis LPEM FEB UI (2020) dan León (2007), namun menggarisbawahi bahwa keberhasilan pariwisata menurunkan kemiskinan memerlukan integrasi partisipasi lokal dan redistribusi manfaat.

Ketiga, keterbukaan perdagangan terbukti menurunkan kemiskinan secara signifikan, sejalan dengan teori Stolper-Samuelson, yang menyatakan bahwa negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional melalui sektor padat karya. Hasil ini didukung oleh studi Kelbore (2015) dan Le Goff & Singh (2014),

yang menekankan pentingnya kapasitas institusi dan kualitas kebijakan perdagangan untuk mengoptimalkan dampaknya. Ini mengindikasikan bahwa ASEAN-5 telah mampu mengarahkan perdagangan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja miskin.

Keempat, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, konsisten dengan teori Modal Manusia (Becker, 1964). Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas, memperluas peluang kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi individu. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Firdaus (2021), Istiandari (2023), serta Bici & Çela (2017). Dalam konteks ASEAN-5, hasil ini menegaskan bahwa investasi pada pendidikan merupakan strategi fundamental dalam memutus rantai kemiskinan jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak inklusif (seperti pariwisata eksklusif) dapat gagal mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, sektor yang berbasis keterbukaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Kebaruan temuan ini terletak pada perbedaan antara dua sisi pariwisata (kunjungan vs penerimaan) dan bukti empiris lintas-negara ASEAN yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas distribusi manfaat dan kapasitas lokal.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi, disimpulkan bahwa:

1. Kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, mengindikasikan paradoks pariwisata. Meskipun sektor pariwisata tumbuh, manfaatnya belum menjangkau kelompok miskin secara adil, bahkan berpotensi memperparah ketimpangan.
2. Penerimaan pariwisata berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari pariwisata perlu dibarengi dengan distribusi manfaat yang lebih merata agar efektif dalam menurunkan kemiskinan.
3. Keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Integrasi ekonomi dengan pasar global dapat menurunkan kemiskinan bila didukung kebijakan inklusif yang memberdayakan sektor padat karya.
4. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas,

memperluas akses pekerjaan layak, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Temuan ini memperkuat teori modal manusia (Becker, 1964) dan teori perdagangan klasik yang menyatakan bahwa integrasi ekonomi serta peningkatan kualitas SDM adalah faktor kunci pengurangan kemiskinan

Saran

Berdasarkan hasil tersebut, penulis merekomendasikan:

1. Pengembangan pariwisata inklusif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata serta pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan.
2. Distribusi manfaat pariwisata yang lebih merata melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil.
3. Kebijakan perdagangan pro-rakyat, khususnya yang mendukung sektor dengan serapan tenaga kerja tinggi dan aksesibilitas bagi kelompok rentan.
4. Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, melalui investasi pada pendidikan dasar hingga pelatihan vokasional guna memperkuat mobilitas sosial jangka panjang

REREFENSI

- Ashley, C., Roe, D., & Goodwin, H. (2001). *Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor*. Overseas Development Institute.
- Astiyanti, N. K. S. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 12(1), 22–30.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Bici, B., & Çela, A. (2017). The impact of education on poverty reduction: Empirical evidence for Western Balkan countries. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 10(2), 53–59. <https://doi.org/10.26417/ejser.v10i2.p53-59>
- Darmawan, D., & Yunanto, A. (2016). Pariwisata Pro Rakyat dalam Perspektif Ekonomi Lokal. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 11(2), 99–113.
- Firdaus, M. (2021). Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 41–52.
- Harrison, D. (2008). Pro-poor Tourism: A critique. *Third World Quarterly*, 29(5), 851–

- Istiandari, A. (2023). Pendidikan dan pengentasan kemiskinan: Studi empiris di ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(2), 95–108.
- Kelbore, Z. G. (2015). Trade openness and poverty: Panel data evidence from sub-Saharan Africa. *International Journal of Economics and Finance*, 7(1), 93–103. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n1p93>
- Le Goff, M., & Singh, R. J. (2014). Does trade reduce poverty? A view from Africa. *World Bank Policy Research Working Paper No. 7095*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7095>
- León, C. J. (2007). The economic impact of tourism in a small island economy: A social accounting matrix approach. *Tourism Economics*, 13(4), 515–528. <https://doi.org/10.5367/000000007782696038>
- LPEM FEB UI. (2020). *Kajian Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Mbaiwa, J. E. (2005). Enclave tourism and its socio-economic impacts in the Okavango Delta, Botswana. *Tourism Management*, 26(2), 157–172. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.11.005>
- Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and Real Wages. *The Review of Economic Studies*, 9(1), 58–73.
- Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and real wages. *The Review of Economic Studies*, 9(1), 58–73. <https://doi.org/10.2307/2967638>
- Torres, R., & Momsen, J. H. (2004). Challenges and potential for linking tourism and agriculture to achieve pro-poor tourism objectives. *Progress in Development Studies*, 4(4), 294–318. <https://doi.org/10.1191/1464993404ps092oa>
- Winters, L. A. (2002). Trade Liberalisation and Poverty: What Are the Links?. *The World Economy*, 25(9), 1339–1367.